



# SATELIT NEWS

JAUH MENJANGKAU, JERNIH BERSUARA

TERBIT SEJAK 16 JUNI 1999

Rakyat Merdeka Grup

EMAIL: REDAKSI@SATELITNEWS.ID  
SA ECRAN RP. 4.000,-

## Bupati Lebak Permalukan Wakilnya

Ungkap Status Mantan Napi di  
Acara Halalbihalal

**SATELITNEWS, LEBAK**—Baru setahun memimpin Kabupaten Lebak, Bupati Hasbi Jayabaya sudah terlibat konflik dengan Wakil Bupati Amir Hamzah. Hasbi melontarkan pernyataan yang membuat Amir merasa dipermalukan.

Ironisnya, konflik itu mencuat ketika Pemkab Lebak melakukan kegiatan halalbihalal di Pendopo Bupati Lebak pada Senin (30/3). Pada momentum dimana para pejabat saling memaafkan itu, Bupati Hasbi Jayabaya menyindir keras Amir Hamzah dengan menyinggung rekam jejak masa lalu sang wakil bupati yang pernah menjadi narapidana.

Awalnya, Hasbi Jayabaya menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran ASN yang hadir. Dalam pemaparannya, Hasbi kemudian menyinggung mengenai kewenangan Wakil Bupati Lebak dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Wakil Bupati memiliki batasan dalam melakukan koordinasi dengan jajaran OPD di lingkungan pemerintahan.

“Wakil Bupati dalam Undang-Undang ASN Pasal 66 tuh tugasnya Wakil Bupati, tidak boleh Wakil Bupati bermain dengan kepala dinas ke rumahnya. Masa Pasal 66 dituliskan bila didelegasikan atau bupati berhalangan, hanya begitu tugas wakil bupati tuh,” ujarnya dalam acara tersebut.

Setelah mengatakan itu Hasbi Jayabaya pun kemudian menyinggung masa lalu Amir Hamzah, yang pernah berstatus sebagai mantan narapidana korupsi. Menurutnya,

BACA  
HAL 8



**MUDIK:** Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan data tentang arus mudik Lebaran 2026.

## 147,5 Juta Orang Mudik

3.517 Kecelakaan Arus Lebaran 2026

**SATELITNEWS, JAKARTA** — Mobilitas masyarakat pada Lebaran 2026 melampaui prediksi, namun jumlah pemudik justru menurun dibanding

BACA HAL 8

### KOTA TANGERANG



Pompa Air Penyedot Banjir Dicuri

HAL 6

### KABUPATEN TANGERANG



Pemkab Siapkan Penghematan Listrik

HAL 7

#### JADWAL SALAT

| Subuh | Terbit | Zuhur | Asar  | Magrib | Isya  |
|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 04.39 | 05.56  | 11.58 | 15.13 | 17.59  | 19.08 |

#### PRAKIRAAN CUACA KOTA TANGERANG

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cuaca<br>Selasa<br>Badai petir tidak merata | 29 °C°F<br>Presipitasi: 40%<br>Kelembapan: 77%<br>Angin: 13 km/h |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## 1.308 Rumah Diperbaiki Tahun Ini

Melalui BSPS  
Kementerian PKP RI

**SATELITNEWS, TIGARAKSA**—Ribuan unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026. Anggaran ini digelontorkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PKP RI Maruarar Sirait saat meninjau langsung rumah tidak layak huni yang mendapatkan BSPS di Desa Pete Kecamatan Tigaraksa, Senin (30/3). Setiap rumah menerima bantuan sebesar Rp20 juta yang bersumber dari APBN.

Dalam kunjungannya, Maruarar menegaskan bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Dari hasil pengecekan di lapangan, ia mengaku puas karena program

BACA HAL 8

## Maesyal Rasyid Marah, Semprot Satpol PP dan ASN



**MARAH:** Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid terlihat marah saat mendapati sejumlah ASN dan Satpol PP bersantai di pinggir lapangan menjelang apel pagi. Dengan tegas, ia memerintahkan mereka untuk segera masuk ke dalam barisan agar upacara bisa dimulai tepat waktu.

Santai-santai Jelang  
Apel Pagi

**SATELITNEWS, TANGERANG**—Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid tak bisa menahan kemarahannya saat menggelar apel pagi di Lapangan Maulana Yudhanegara, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Senin (30/3). Rudi terlihat kesal karena banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Satpol PP yang tampak bersantai di pinggir lapangan serta tidak segera memasuki barisan untuk memulai upacara.

Dalam video berdurasi 50 detik yang beredar, tampak Maesyal berjalan di sekitar lapangan sambil menunggu para peserta apel. Alih-alih segera memasuki barisan, sejumlah ASN dan anggota Satpol PP justru memilih di pinggir membuat

pelaksanaan apel pagi molor dan tak kunjung dimulai.

Melihat situasi tersebut, Maesyal yang merasa kesal langsung mendekati para pegawai. Dengan nada tinggi, ia memerintahkan para ASN dan Satpol PP untuk segera masuk ke dalam barisan.

“Ini kenapa pada di sini saja, ayo masuk barisan!” ujar Rudi Maesyal dengan ekspresi marah, Senin pagi.

Lebih lanjut, Rudi menekankan bahwa Satpol PP seharusnya berperan aktif dalam membantu merapikan barisan agar apel bisa dimulai tepat waktu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya mengatur barisan, sebagian anggota Satpol PP malah terlihat bergabung dengan ASN lainnya yang memilih berteduh.

BACA HAL 8



**SAMPAH:** Timbunan sampah memenuhi sebagian badan jalan Jalan Industri VIII, Senin (30/3).

## Tumpukan Sampah Hampir Tutup Jalan

Aktivitas Warga  
Terganggu

**SATELITNEWS, TANGERANG**—Tumpukan sampah menggunung sepanjang sekitar 15 meter terlihat menutup sebagian badan Jalan Industri VIII, Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin (30/3). Kondisi ini tak hanya mengganggu estetika, tetapi juga memicu kemacetan serta keluhan

warga akibat bau menyengat.

Berdasarkan pantauan wartawan pada pukul 15.34 WIB, sampah masih melintang di badan jalan dan belum sepenuhnya terangkut. Sebagian ruas jalan tertutup, memaksa kendaraan melambat dan bergantian melintas di jalur yang tersisa.

Seorang pekerja proyek di sekitar lokasi, Yusuf (41), mengungkapkan bahwa kondisi tersebut terjadi pasca-Lebaran. Ia menyebut, sebelum Ramadan, area tersebut

relatif bersih dan tidak mengalami penumpukan signifikan.

“Sebelum puasa masih plong, sampah cuma sedikit. Habis Lebaran begini tiba-tiba menumpuk, saya juga kaget,” ujarnya.

Menurutnya, kini tumpukan sampah bahkan menutup sebagian badan jalan, sehingga arus lalu lintas kerap tersendat, terutama saat jam sibuk.

BACA HAL 8



# Tata Kelola Aset yang Dirampas Harus Dibenahi RUU

**SATELITNEWS, JAKARTA** – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, dalam RDPU Komisi III dengan Para Pakar terkait Menerima Masukan RUU Perampasan Aset di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).



**RDPU KOMISI III:** Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, dalam RDPU Komisi III dengan Para Pakar terkait Menerima Masukan RUU Perampasan Aset di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Padahal, semangat utama pembentukan aturan tersebut bukan untuk memperluas kewenangan aparat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum terkait penanganan aset hasil tindak pidana. Benny menilai penting bagi para penyusun undang-undang untuk memahami secara tepat tujuan dari regulasi tersebut agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam implementasinya.

“Adakesan, undang-undang perampasan aset ini dibutuhkan supaya aparat penegak hukum bisa dengan gampang merampas aset-aset hasil tindak pidana, ataupun aset-aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kalau ini pemahamannya, menurut saya kita misleading,” tegas Benny dalam RDPU Komisi III dengan Para Pakar terkait Menerima Masukan RUU Perampasan Aset di Nusantara II, Senayan, Jakarta, dilansir dari laman dpr.go.id, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap undang-undang tersebut, justru berangkat dari persoalan, ketidakjelasan tata kelola aset yang selama ini disita, diblokir, maupun dirampas oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, menurut dia, masih terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana aset-aset tersebut dikelola setelah diputuskan oleh pengadilan.

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menilai kondisi tersebut perlu dibenahi melalui regulasi yang jelas agar pengelolaan aset rampasan dapat memberikan manfaat bagi negara serta tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.

“Yang terjadi selama ini

apa? Ini yang tidak jelas. Sudah dirampas, tidak jelas penggunaannya. Oleh sebab itu, undang-undang perampasan aset ini dimaksudkan supaya ada tata kelola pengelolaan aset-aset yang dirampas untuk kepentingan negara ini,” bebenya.

Terakhir menurut Benny, kehadiran RUU Perampasan Aset diharapkan mampu menjawab berbagai ketidakpastian tersebut sekaligus menghadirkan sistem pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel.

“Ini yang menurut saya menjadi tujuan utama undang-undang perampasan aset supaya ada kejelasan dalam hal tata kelola aset-aset yang telah dinyatakan dirampas oleh hakim atau oleh pengadilan,” pungkasnya. **(dgi)**



**RDPU KOMISI III DPR BAHAS KONFLIK PERUMAHAN, BERUJUNG KESEPAKATAN DAMAI**  
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (ketiga kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath (kanan) dan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Adang Daradjatun (kiri) menerima berkas kesepakatan damai dari perwakilan PT Hasana Damai Putra dan warga perumahan Cluster Vasana dan Neo Vasana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Dalam RDPU tersebut, Komisi III DPR memfasilitasi penyelesaian sengketa antara warga dan pengembang serta menyerahkan Piagam Penghargaan Aryaseva Sammana Nusantara kepada Kapolres Metro Bekasi Sumarni atas dedikasi dan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban hingga tercapainya kesepakatan damai, sehingga warga dapat beribadah dengan tenang.

# Lemahnya Tata Kelola Data Nasional

## Dampak dari Ego Sektoral Antar-Lembaga

**SATELITNEWS, JAKARTA** - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti masih lemahnya tata kelola data nasional akibat ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikannya dalam

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para pakar dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, di Ruang Rapat Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Dalam rapat tersebut, Firman menegaskan bahwa persoalan data nasional bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut aspek strategis, termasuk dalam konteks demokrasi dan pemilu.

“Yang paling bahaya itu adalah data kependudukan. nanti ada kepentingan Pemilu untuk memilih calon pemimpin. Kalau datanya nggak kredibel, ini menjadi masalah besar,” ujarnya dilansir dari laman dpr.go.id. Ia menekankan bahwa konsep Satu Data Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas data nasional, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. “Dengan satu data ini, pembangunan bisa terencana dengan baik dan optimal. Kemudian satu data ini juga bisa mengidentifikasi prioritas antara satu dengan yang lain, juga mengemban kebijakan yang lebih efektif, mengukur kemajuan pembangunan,” lanjutnya. Namun demikian, Firman mengungkapkan bahwa imple-

mentasi di lapangan masih jauh dari harapan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya integrasi data antar lembaga, termasuk dengan Badan Pusat Statistik yang seharusnya menjadi rujukan nasional. “Ketika kami gali, itu adalah sulitnya mengolah data dari pemerintahan lembaga terkait. Karena ego sektoral,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti potensi manipulasi data akibat perbedaan kepentingan antara pengumpul dan pengolahan data. Ia menilai kondisi tersebut dapat membuka celah praktik “main mata” yang berdampak pada ketidakakuratan data nasional. Sebagai solusi, Firman mengusulkan pembentukan satu lembaga terpadu yang mengintegrasikan fungsi pengumpulan dan pengolahan data dalam satu sistem yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Firman berharap, melalui penyusunan regulasi yang komprehensif, tata kelola data nasional ke depan dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung pembangunan yang berbasis data yang akurat dan terencana. “Tujuannya adalah bahwa ke depan itu regulasi ini bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, dan tujuannya tercapai. Sehingga efektif, efisien, dan optimal ini bisa tercapai dengan undang-undang yang akan kita buat,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. **(dgi)**

**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN**  
Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara Open Bidding tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penatara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, terhadap jaminan Debitur **PT. Fitech Anugrah Mekindro Perkara**, berupa :  
  
**Objek Lelang**  
3 (tiga) Bidang Tanah berikut Bangunan Gudang diatasnya yang dijual dalam satu paket dengan Total Luas 2.972 m<sup>2</sup> terdiri dari SHGB No.00319/Kedung Barat atas nama Julius Gunawan Luas 988 m<sup>2</sup>, SHGB No.00521/Kedung Barat atas nama Julius Gunawan Luas 1.539 m<sup>2</sup>, SHGB No.00922/Kedung Barat atas nama Julius Gunawan Luas 435 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Siapang Raya No.90 Desa Kedung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.  
  
**Harga Limit** Rp. 7.500.000.000,- dan **Uang Jaminan** Rp. 1.500.000.000,-

**Persyaratan Lelang :**  
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id/](http://www.lelang.go.id/)  
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.  
  
**Pelaksanaan Lelang :**  
1. Cara Penawaran : Open Bidding (dengan mengakses url [www.lelang.go.id/](http://www.lelang.go.id/))  
2. Tanggal : 31 Maret 2026  
3. Batas Akhir Penawaran : 14 April 2026 Pukul 10.05 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB.  
4. Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran  
5. Pelunasan Harga Lelang : Paling Lambat 5 (lima) Hari Kerja Setelah Pelaksanaan Lelang.  
6. Bea Lelang Pembed : 2% Dari Harga Lelang.  
7. Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Tangerang II  
Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang.

**Keterangan :**  
1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.  
2. Jaminan harus sudah efektif diartikan oleh KPKNL sebelum – lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.  
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penjaminan lain-lain.  
5. Pemenang Lelang, berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.41 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke Rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.  
6. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), semua resiko ditanggung pembeli. Karena satu dari lain hal pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas dan pihak – pihak yang berkepentingan/pemilik lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan/atau KPKNL Tangerang II.  
7. Obyek lelang dapat dilihat di lokasi sejak pengumuman ini diterbitkan sampai dengan sebelum lelang.  
8. Sejalan Jaminan tidak dapat diklaim kembali karena pelaksanaan lelang dinyatakan selesai.  
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Tangerang II Telp. (021-5571198 atau PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management Jakarta Thamrin, Wisma Mandiri II, Jalan Kebon Sirih Nomor 83, Jakarta Pusat. Telp. : 021 30400167  
  
Jakarta, 31 Maret 2026  
**mandiri**  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

**PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN DAN FIDUSIA MELALUI E-AUCTION (OPEN BIDDING)**  
Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia pada tanggal 11 Februari 2026 di Harian Tangsi Pos dan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia pada tanggal 25 Februari 2026 di KPKNL Tangerang II, serta berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia **PT Bank Mandiri (Persero)**, Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dan Fidusia akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II dengan jenis penawaran lelang melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang terhadap objek jaminan debitur atas nama **PT SMS Steel**, dengan rincian sebagai berikut:  
  
3 (tiga) bidang tanah dan bangunannya beserta mesin-mesinnya dalam satu hamparan dengan luas tanah 40.158 m<sup>2</sup> yang terletak di Kawasan Industri Benua Pernal Lestari, Blok C Nomor 1, Jalan Raya Balajara Segur KM 26, Desa Cisereh dan Desa Pasir Bolang (dahulu dikenal Desa Pematang), Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan buku kepemilikan SHGB No. 00085/Cisereh seluas 27.780 m<sup>2</sup>, SHGB No. 00031/Pasir Bolang seluas 4.748 m<sup>2</sup>, SHGB No. 00737/Pasir Bolang (dahulu dikenal Desa Pematang) seluas 7.630 m<sup>2</sup>, serta mesin sesuai SJF No. W29.00000559 AH.05.01 TH 2012 dengan AJF No. 4 tanggal 01 Desember 2011; SJF No. W12.00037128 AH.05.01 TH 2015 dengan AJF No. 131 tanggal 27 Nopember 2014; dan SJF No. W12.00137816 AH.05.01 TH 2015 dengan AJF No. 21 tanggal 24 Maret 2015 yang tercatat a.n. PT SMS Steel.  
**Nilai Limit: Rp.145.000.000.000,- dan Nilai Setoran Jaminan: Rp.30.000.000.000,-**

**• Cara penawaran:** Terbuka, melalui internet (open bidding)  
**• Pelaksanaan Lelang:** Kamis, 16 April 2026  
**• Batas Akhir Penawaran:** Pukul 09:50 WIB (waktu server)  
**• Alamat Domain:** <https://www.lelang.go.id/>  
**• Tempat Lelang:** Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Sukasahi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten  
**• Penetapan Pemenang:** Setelah batas akhir penawaran  
**• Bea Lelang Pembed:** 3%  
**• Pelunasan Harga Lelang:** 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang  
**• Aanwijzing:** Senin, 13 April 2026 pukul 10:00 WIB  
  
**Keterangan:**  
• Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.  
• Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL Tangerang II selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
• Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan berlaku.  
• Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.  
• Barang atau objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is). Calon peserta lelang diwajibkan melihat dan mengetahui barang atau objek yang akan ditawarkan.  
  
SYARAT LELANG:  
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat dalam menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” dalam laman tersebut.  
2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Special Asset Management 3 Group Departemen Commercial Asset Management I, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Lt. 16, Jakarta 12190, Telp. 021-30023000 ext. 5962, Hp. 082187810805** pada hari dan jam kerja.

**Jakarta, 31 Maret 2026**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**mandiri**  
KPKNL Tangerang II

**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN**  
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penatara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : [lelang.go.id](http://lelang.go.id) atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :  
  
**SAEPUL MILAH** 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 2666 atas nama SAEPUL MILAH dengan luas tanah 121 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Peruk Jaya, Kec. Peruk, Kota Tangerang, Prov. Banten (sesuai sertifikat), (selampat dikenal dengan Kp. Pengasinan Gang H. Tohir, RT. 003 RW. 03), Kel. Peruk Jaya, Kec. Peruk, Kota Tangerang, Prov. Banten.  
**(Harga Limit Rp 216.000.000,- Setoran Jaminan Rp 22.000.000)**

**Pelaksanaan Lelang :**  
**Hari :** Rabu  
**Tanggal :** 15 April 2026  
**Waktu Penawaran :** Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
**Batas Akhir Penawaran :** 15 April 2026 pukul 09:40 WIB (sesuai waktu server)  
**Alamat Domain :** [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
**Tempat Lelang :** Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten  
**Penetapan Pemenang :** setelah batas akhir penawaran

**Peserta lelang diharap** menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.  
**Syarat-syarat lelang :**  
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.  
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi .jpg.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang berbidak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur diketahui Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa ; NIB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.  
3. Peserta lelang diwajibkan menyerahkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.  
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.  
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah lelang selesai dilaksanakan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatikan sebagai penerimaan lain-lain.  
6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.  
7. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.  
8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management III** Jakarta 1 Telp. (021) 30023002 atau **KPKNL Tangerang II** Telp. (021) 53163556.

**Jakarta, 31 Maret 2026**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**mandiri**  
KPKNL Tangerang II

**PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN**  
Menunjuk pelaksanaan Lelang tanggal 10 Februari 2026 dan Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan yang diumumkan di Satelit News pada tanggal 27 Januari 2026, Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penatara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : [lelang.go.id](http://lelang.go.id) atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :  
  
**PUTRI ASRI PRABOWO** 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 03013 an. PUTRI ASRI PRABOWO dengan luas tanah 73 m<sup>2</sup> terletak di Blok F No.27, Desa Sukakadi, Kecamatan Curiung, Provinsi Banten (sesua sertifikat), (selampat dikenal dengan Blok Hijau Karawati Blok F No.27), Kelurahan Sukakadi (di Desa Curiung), Kecamatan Curiung, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.  
**(Harga Limit Rp 325.000.000,- Setoran Jaminan Rp 33.000.000)**

**Pelaksanaan Lelang :**  
**Hari :** Rabu  
**Tanggal :** 08 April 2026  
**Waktu Penawaran :** Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
**Batas Akhir Penawaran :** 08 April 2026 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server)  
**Alamat Domain :** [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
**Tempat Lelang :** Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten  
**Penetapan Pemenang :** setelah batas akhir penawaran

**Peserta lelang diharap** menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.  
**Syarat-syarat lelang :**  
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.  
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi .jpg.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang berbidak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur diketahui Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa ; NIB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.  
3. Peserta lelang diwajibkan menyerahkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.  
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.  
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah lelang selesai dilaksanakan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatikan sebagai penerimaan lain-lain.  
6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.  
7. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.  
8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management III / Jakarta 1 Telp. (021) 30023002** atau **KPKNL Tangerang II Telp. (021) 53163556**.

**Tangerang, 31 Maret 2026**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**mandiri**  
KPKNL Tangerang II

**PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN**  
Menunjuk pelaksanaan Lelang tanggal 27 Februari 2026 dan Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan yang diumumkan di Satelit News pada tanggal 13 Februari 2026, Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penatara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : [lelang.go.id](http://lelang.go.id) atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :  
  
**DAMIANIUS WIWIED WINDIAWAN** 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No.07327 an. D. WIWIED WINDIAWAN (DAMIANIUS WIWIED WINDIAWAN) dengan luas tanah 92 m<sup>2</sup> terletak di Blok : D.1 No.126, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten (sesuai sertifikat), (selampat dikenal dengan Perumahan Paradise Resort Cluster The Bay Blok D1 No. 126), Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.  
**(Harga Limit Rp 1.081.000.000,- Setoran Jaminan Rp 109.000.000)**

**Pelaksanaan Lelang :**  
**Hari :** Rabu  
**Tanggal :** 08 April 2026  
**Waktu Penawaran :** Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
**Batas Akhir Penawaran :** 08 April 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)  
**Alamat Domain :** [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
**Tempat Lelang :** Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten  
**Penetapan Pemenang :** setelah batas akhir penawaran

**Peserta lelang diharap** menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.  
**Syarat-syarat lelang :**  
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.  
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi .jpg.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang berbidak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur diketahui Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa ; NIB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.  
3. Peserta lelang diwajibkan menyerahkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.  
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.  
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah lelang selesai dilaksanakan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatikan sebagai penerimaan lain-lain.  
6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.  
7. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.  
8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management III / Jakarta 1 Telp. (021) 30023002** atau **KPKNL Tangerang II Telp. (021) 53163556**.

**Tangerang, 31 Maret 2026**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**mandiri**  
KPKNL Tangerang II

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**TAHUN AKADEMIK 2026/2027**  
**FAKULTAS & PROGRAM STUDI**  
**FAKULTAS EKONOMI BISNIS**  
Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Akuntansi (D3)  
Bisnis Digital (S1)  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
Pendidikan Agama Islam (S1)  
Perbankan Syariah (S1)  
Pendidikan Bahasa Arab (S1)  
Psikologi Islam (S1)  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
Keperawatan (S1)  
Profesi Ners (Profesi)  
Kebidanan (Profesi)  
Profesi Kebidanan (Profesi)  
**Contact Person**  
**DEDE 0896 6474 8733**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)  
Pendidikan Anak Usia Dini (S1)  
Pendidikan Matematika (S1)  
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia (S1)  
Pendidikan Bahasa Inggris (S1)  
**FAKULTAS TEKNIK**  
Teknik Informatika (S1)  
Teknik Industri (S1)  
Teknik Elektro (S1)  
Teknik Mesin (S1)  
Teknik Sipil (S1)  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Ilmu Komunikasi (S1)  
Ilmu Pemerintahan (S1)  
**\*S&K setelah melakukan Registrasi minimal Rp.3.000.000**  
**Berlaku untuk Mahasiswa/Alumni/Keluarga UMT**

**PROGRAM PERKULIAHAN**  
**Ilmu Hukum (S1)**  
**FAKULTAS PERHISWASA DAN INDUSTRI KREATIF**  
Periklanan (D3)  
Pariwisata (S1)  
Transportasi (S1)  
Desain Komunikasi Visual (S1)  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
Magister Manajemen (S2)  
Magister Pendidikan Agama Islam (S2)  
Magister Akuntansi (S2)  
Magister Hukum (S2)  
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S2)  
**BAWA CALON MAHASISWA BARU DAPATKAN FEE Rp.1.000.000**  
**(Klaim Langsung di PMB)**  
**GELOMBANG 1** 02 Januari - 08 April  
**GELOMBANG 2** 08 April - 08 Juni  
**GELOMBANG 3** 07 Juni - 31 Agustus  
**PENDAFTARAN BUKA! SETIAP HARI...**  
**SCAN! Pendaftaran**  
**UNGUGL, INKLUSIF**  
Pusat PMB 0812 8578 4064 [www.umt.ac.id](http://www.umt.ac.id) Jl. Perintis Kemerdekaan 1/3 Cikokol - Tangerang 15118  
Follow Us On @UMT Indonesia





MOTO3



ISTIMEWA  
**JATUH:** Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal menuntaskan balapan Moto3 AS di Circuit of the Americas, Senin (30/3/2026) dini hari WIB. Ia terjatuh di putaran keempat di posisi keenam.

Crash di Amerika, Veda Dapat Pelajaran

**SATELITNEWS,TANGERANG**—Veda Ega Pratama merasa punya kesempatan bagus di Moto3 Amerika Serikat 2026. Tapi sebuah kesalahan menghukum dan memberinya pelajaran berharga.

Veda Ega Pratama tak bisa menuntaskan balapan Moto3 AS di Circuit of the Americas, Senin (30/3/2026) dini hari WIB. Ia terjatuh di putaran keempat di posisi keenam.

Padahal saat itu lajunya tampak sangat kompetitif. Pebalap asal Wonosari tersebut sempat mencatatkan waktu putaran terbaik dan berada di grup terdepan.

Dengan laju itu, peluang untuk melanjutkan hasil bagus di awal musim pun terbuka lebar. Veda sebelumnya finis kelima di Thailand dan naik podium tiga di Brasil.

“Tentu saja saya kecewa karena saya pikir hari ini kami memiliki kesempatan yang bagus. Tetapi insiden ini juga menjadi bagian dari pembelajaran dan pengalaman,” ujar pebalap 17 tahun tersebut. “Saya menerima ini sebagai pelajaran penting untuk kembali lebih kuat di Jerez,” tutur Veda.

Tanpa hasil di Moto3 Amerika Serikat 2026, Veda Ega Pratama kini turun ke posisi tujuh di klasemen kejuaraan dunia. Ia mengoleksi 27 poin dengan Maximo Quiles memimpin berbekal 65 poin.

Seri Moto3 berikutnya akan digelar di Jerez, Spanyol pada 26 April 2026. Ajang Moto3 Spanyol itu akan membuka rangkaian balapan di Eropa.

Veda mengaku balapan berjalan amat intens. Saat pada akhirnya mulai menemukan ritme yang tepat, ia melakukan kesalahan fatal. “Balapan kali ini sangat berat bagi saya karena sejak awal terjadi banyak pertarungan agresif di dalam grup, dan tidak mudah mengendalikan semuanya,” kata Veda Ega dalam rilis resmi Honda Team Asia.

“Tetapi setelah itu saya mulai merasa lebih baik dan menemukan ritme saya, sehingga mampu menyalipl beberapa pebalap dan mulai bersaing di grid terdepan.”

“Sayangnya saya melakukan kesalahan dan itu mengakhiri balapan saya. Saya sedikit melebar dan kemudian membuka gas terlalu agresif saat masih dalam kondisi miring, dan saya kehilangan kendali motor.”

Jatuhnya Veda membuatnya kehilangan kans untuk memetik hasil bagus lainnya, setelah di Thailand dan Brasil. Ia sempat mengukir catatan waktu tercepat sebelum jatuh di Moto3 Amerika semalam. **(dtc)**

| PERKIRAAN SUSUNAN PEMIAN | BOSNIA-HERZEGOVINA                                                                                    | (4-4-2)         | ITALIA                                                                                                 | (3-5-2)         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          | Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko |                 | Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito |                 |
|                          | PELATIH                                                                                               | SERGEJ BARBAREZ | PELATIH                                                                                                | GENNARO GATTUSO |



ISTIMEWA  
**PENENTUAN NASIB:** Italia saat menghadapi Bosnia-Herzegovina dalam final play-off Piala Dunia 2026 di Bilino Polje, Zenica, Rabu (1/4/2026) pukul 01.45 WIB.

Hidup-Mati Azzurri

Bosnia-Herzegovina vs Italia

**SATELITNEWS,TANGERANG**—Laga hidup-mati bakal dilakoni Italia saat menghadapi Bosnia-Herzegovina dalam final play-off Piala Dunia 2026 di Bilino Polje, Zenica, Rabu (1/4/2026) pukul 01.45 WIB. Gli Azzurri tinggal selangkah lagi menuntaskan Impian Panjang tampil di piala dunia setelah absen di 12 tahun alias tiga edisi terakhir.

Kini, semua mata tertuju pada satu pertandingan melawan Timnas Bosnia dan Herzegovina di Bilino Polje. Italia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk kembali ke Piala Dunia dan bergabung di Grup B bersama Kanada, Qatar, dan Swiss.

Italia datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Irlandia Utara di semifinal playoff. Hasil itu membawa mereka ke satu laga terakhir yang menentukan.

Sementara Bosnia menempuh jalan yang lebih dramatis. Mereka harus melewati adu penalti untuk menyingkirkan Wales setelah bermain imbang 1-1.

Pertemuan ini bukan sekadar soal kualitas tim. Atmosfer di Zenica dikenal tidak ramah bagi tim tamu.

Bilino Polje pernah menjadi tempat yang sulit ditaklukkan. Dalam rentang panjang, Bosnia bahkan sempat tak terkalahkan di sana selama berta-



ISTIMEWA

hun-tahun.

Bagi Bosnia, ini adalah kesempatan emas untuk kembali ke Piala Dunia sejak debut mereka di tahun 2014 silam.

Atmosfer makin panas karena bek Italia dan Inter Milan, Federico Dimarco. Video selebrasinya usai Bosnia menang atas Wales viral. Tindakannya dianggap meremehkan. Aksi itu dianggap sebagai bentuk kesombongan yang merendahkan harga diri masyarakat Bosnia. “Bagaimana mungkin saya sombong, sedangkan

kita tidak ke Piala Dunia sejak 2014?” bela Dimarco.

Meski telah membantah, provokasi ini kadung membakar semangat militan suporter tuan rumah. Italia harus siap menghadapi tekanan mental yang luar biasa sejak menit awal.

Masalah Italia bukan hanya lawan di depan mata. Ada sesuatu yang lebih dalam: beban mental.

Gelandang Azzurri, Sandro Tonali sempat mengakui bahwa timnya seperti menghadapi “monster” dalam pikiran mereka saat melawan Ir-

landia Utara. Namun di laga itu juga, Tonali justru menjadi pembeda. Ia mencetak gol dan memberikan assist, bukan menepis keraguan yang sempat membayangi.

Gattuso mencoba mengubah pendekatan. Ia meminta para pemainnya menikmati pertandingan, bukan terbebani oleh ekspektasi.

Di atas kertas, Italia tetap lebih unggul. Mereka bahkan memiliki catatan head-to-head yang kuat dengan empat kemenangan dari enam pertemuan melawan Bosnia. Tapi sepak bola tidak selalu berjalan sesuai logika.

Bek Timnas Italia Federico Gatti meminta rekan setimnya untuk mengabaikan suara-suara eksternal jelang final playoff Piala Dunia 2026 melawan Bosnia-Herzegovina. Biarkan hasil di lapangan yang bicara.

“Segalanya akan berbicara sendiri di lapangan, ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Saya belum pernah bermain di Bosnia, tetapi saya diberi tahu lapangannya kecil, para fan di sana sangat antusias, ini akan menjadi tantangan yang sesungguhnya,” ujar Gatti kepada Rai Sport, dikutip Football Italia.

“Saya tak suka berbicara sebelum laga, saat ini semua orang bisa menilai. Ini adalah laga yang dapat mengubah masa depan kami. Kami harus melihatnya dari perspektif itu dan hanya itu saja. Biarkan saja orang lain berbicara,” jelas bek Juventus itu. **(bl/dtc)**

Les Bleus Menang, Deschamp Meradang

Kolombia 1 vs Prancis 3

**SATELITNEWS,TANGERANG**—Prancis menutup uji coba bulan Maret dengan menak Kolombia 3-1. Hasil ini menjadi bekal positif bagi skuad asuhan Didier Deschamps jelang Piala Dunia 2026.

Bertanding di Northwest Stadium, Maryland, Senin (30/3/2026), Prancis membuka skor di menit ke-29. Tembakan jarak jauh Desire Doue mengenai salah satu bek Kolombia lalu bersarang di sudut kanan gawang, mengecoh kiper Alvaro Montero yang salah langkah.

Les Bleus lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-41. Marcus Thuram menuntaskan umpan silang Maghnes Akliouche dari sisi kanan dengan tandukan yang bersarang di tengah gawang Kolombia. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Doue mencetak gol keduanya di laga ini untuk membawa Prancis unggul 3-0. Bermula dari serangan balik yang dibangun Akliouche di menit ke-56, bola diteruskan kepada Thuram melalui Rayan Cherki.

Thuram lalu melepaskan crossing ke tengah kotak penalti Kolombia tempat Doue berada. Meski sempat mengenai



ISTIMEWA

**MENANG:** Prancis menang 3-1 atas Kolombia dalam laga uji coba di Northwest Stadium, Maryland, Senin (30/3/2026) dini hari.

tangan Montero, namun tembakan pemain Paris Saint-Germain itu tetap melaju ke dalam gawang lawan.

Kolombia lalu menipiskan jarak di menit ke-77 usai tembakan Jaminton Campaz yang menuntaskan umpan Jefferson Lerma mengenai tiang sebelum bersarang di gawang Prancis yang dijaga Brice Samba.

Skor 3-1 bertahan hingga usai. Kedua tim masih akan menjalani sejumlah

uji coba pada akhir Mei dan awal Juni mendatang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai.

Prancis tergabung di Grup I bersama Senegal, Norwegia, dan pemenang Irak vs Bolivia. Sedangkan Kolombia berada di Grup K bersama Uzbekistan, Portugal, dan pemenang RD Kongo vs Jamaika.

Pelatih Prancis Didier Deschamps tampak sangat kesal meski Prancis

berhasil mengalahkan Kolombia dengan skor 3-1, dan ia melontarkan kritik pedas terhadap gaya permainan fisik tim Amerika Selatan tersebut. Pelatih tim nasional itu sangat geram atas tekel keras yang dilakukan terhadap Michael Olise di menit-menit akhir, yang menurutnya lebih pantas dilakukan dalam cabang olahraga yang sama sekali berbeda.

Deschamps tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan setelah melihat timnya menutup tur singkat di Amerika Serikat dengan kemenangan kedua berturut-turut, berkat dua gol internasional perdana dari Desire Doue dan sundulan jarak dekat dari Marcus Thuram. Meskipun skor akhir menunjukkan pertandingan yang berjalan lancar di Washington, kenyataan taktisnya jauh lebih sengit, sehingga Deschamps menegur tim wasit terkait kurangnya perlindungan bagi para bintang timnya. “Saya bilang ke wasit keempat: ‘Ini bukan sepak bola Amerika!’ Tidak ada tekel! Untungnya, tidak ada konsekuensi serius,” katanya kepada TFI.

Insiden paling menegangkan terjadi di detik-detik terakhir waktu tambahan ketika Olise dijatuhkan oleh tekel yang

sangat keras. Deschamps menegaskan bahwa hanya refleks cepat sang pemain sayap yang mencegah cedera serius. Ia menambahkan: “Soal tekel terhadap Michael, jika dia tidak melompat, dia bisa patah kaki! Ini pertandingan persahabatan... agresivitas boleh-boleh saja, kita tahu itu, tapi ini sudah melampaui batas.”

“Pertandingan itu sangat agresif. Anda tahu itu sama seperti saya, tim-tim Amerika Selatan memang seperti itu. Mengetahui bahwa tidak ada VAR sedikit membantu, terutama pada aksi terakhir itu, tekel terakhir terhadap Michael Olise... untungnya dia melompat, kalau tidak, dia hanya akan punya satu kaki tersisa!”

Intensitas pertandingan persahabatan tersebut menjadi pengingat mengapa Deschamps memilih untuk melakukan rotasi skuadnya secara besar-besaran. Dengan gelar domestik dan prestasi di level Eropa yang dipertaruhkan, pelatih Prancis itu menyadari keseimbangan yang rapuh antara tugas internasional dan tuntutan klub-klub papan atas. Banyak pemain yang disimpan di bangku cadangan secara khusus untuk menghindari insiden seperti yang dialami Olise. **(dtc/bl/net)**



SIAP DIGUNAKAN: Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan siap digunakan.

## Efektif 30 Maret 2026, Kantor Disdukcapil Pindah

**SATELITNEWS,TANGSEL**—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pindah kantor mulai Senin (30/3). Setelah sempat menempati Gedung Eks Kantor Kecamatan Setu di Jalan Raya Puspipetek, Disdukcapil kini berkantor di gedung lama yang telah selesai direnovasi di Jalan Raya Serpong km 16, Cilenggang, Serpong. Plt Kepala Disdukcapil Kota Tangsel Dwi Suryani mengatakan, pindah lokasi kantor dan pelayanan di dinas akan menambah semangat baru bagi para pegawai untuk melayani permohonan adminduk masyarakat. “Menempati gedung baru diharapkan membawa suasana segar, meningkatkan semangat kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi yang lebih baik,” kata Dwi dilansir situs resmi Pemkot Tangsel, Senin (30/3). Dwi juga berharap, fasilitas yang ada di gedung baru yang ditempati

dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat demi pelayanan Pemerintah Kota Tangsel yang optimal. “Fasilitas baru juga diharapkan memberikan kenyamanan, keamanan, dan mempererat kerjasama tim dalam mencapai target serta kesuksesan bersama di masa depan. Peningkatan pelayanan menjadi sarana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya. Selain pelayanan offline di kantor, Pemerintah Kota Tangsel juga mendorong pelayanan adminduk secara online melalui portal yang disediakan yakni <https://rumahdukcapil.tangerangselankota.go.id/>. Dalam portal layanan daring tersebut, masyarakat Kota Tangsel dapat mengakses berbagai permohonan layanan adminduk dan informasi terkait layanan yang disediakan oleh Pemkot Tangsel pada Disdukcapil. **(eko/gatot)**



ILUSTRASI.

## Alarm Bagi Industri Fintech

KPPU Denda 97 Perusahaan Pinjol Rp 755 Miliar Soal Kartel Bunga

**SATELITNEWS,CIPUTAT**—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada 97 perusahaan fintech pinjaman online (pinjol) dengan total nilai mencapai Rp 755 miliar. Puluhan perusahaan tersebut dinyatakan terbukti melakukan praktik kartel suku bunga yang melanggar aturan persaingan usaha. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang dipimpin Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi, Kamis (26/3). Dalam amar putusannya, majelis menyatakan para pelaku usaha melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait penetapan harga secara kolektif atau price fixing. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik asal Tangerang Selatan (Tangsel), Abdul Hamim Jauzie menilai, putusan tersebut merupakan peringatan keras bagi industri keuangan digital di Indonesia. “Putusan Perkara 05/KPPU-I/2025 ini merupakan judicial alarm bagi industri finansial kita. Penetapan harga kolektif atau price fixing bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999,” ujar Hamim, Minggu (29/3). Menurutny, praktik penyeragaman suku bunga yang dilakukan secara bersama-sama membuat posisi konsumen menjadi sangat lemah. “Ketika 97 perusahaan bersekongkol menyeragamkan bunga, daya tawar konsumen menjadi lumpuh,” katanya. Hamim juga menyoroti pentingnya perlindungan hak konsumen dalam praktik industri keuangan digital. Ia menilai, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan serta pilihan layanan yang adil. “Jangan sampai jargon inklusi keuangan justru dijadikan tameng untuk praktik ekonomi yang eksploitatif,” tegasnya. Ia juga menilai, kasus ini menunjukkan adanya celah pengawasan

antara regulator sektor keuangan dan lembaga pengawas persaingan usaha. “Kasus ini mengonfirmasi adanya *regulatory gap* antara OJK dan KPPU. Ke depan perlu pengawasan bersama agar celah regulasi seperti ini bisa ditutup,” jelasnya. Dalam putusannya, majelis komisi menjatuhkan denda administratif dengan nilai yang bervariasi. PT Kredit Pintar Indonesia dikenai denda terbesar yakni Rp 93,6 miliar, disusul PT Amarthia Mikro Fintek sebesar Rp 48,8 miliar, serta PT Kredifazz Digital Indonesia sebesar Rp 42,4 miliar. Selanjutnya, PT Uangme Fintek Indonesia didenda Rp 23,5 miliar dan PT Artha Dana Teknologi Rp 22,9 miliar. Sejumlah perusahaan lain juga dikenai sanksi miliaran rupiah, di antaranya PT Julo Teknologi Finansial Rp 12,2 miliar, PT Indonesia Fintopia Technology Rp 11,1 miliar, PT Glid Riset Teknologi Rp 8,5 miliar, PT Pintar Inovasi Digital Rp 8,1 miliar, serta PT Finacel Digital Indonesia sebesar Rp 7,4 miliar. Selain itu, puluhan perusahaan fintech lainnya juga dikenai denda dengan nilai lebih kecil. Bahkan 77 perusahaan dijatuhi sanksi denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar. Menanggapi putusan tersebut, Hamim mengatakan, sebagian pelaku industri fintech melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan keberatan atau banding melalui Pengadilan Niaga. Meski demikian, Hamim menilai, langkah tersebut perlu dipertimbangkan secara matang oleh pelaku industri. “Banding memang hak konstitusional. Namun industri harus menyadari bahwa kepercayaan publik adalah aset paling mahal,” ujarnya. Ia menambahkan, kemenangan secara prosedural di pengadilan tidak selalu sejalan dengan kepercayaan masyarakat. “Menang secara hukum tetapi kehilangan legitimasi moral di mata publik justru bisa mempercepat keruntuhan ekosistem fintech itu sendiri,” pungkasnya. **(rmm)**



JAGA: Petugas Satpol PP Kota Tangerang Selatan berjaga se usai melakukan penertiban.

## Didominasi Pedagang Asal Pandeglang dan Lebak PKL Pasar Serpong Ditertibkan

**SATELITNEWS,TANGSEL**—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong, Senin (30/3). Penertiban dilakukan karena masih ditemukan pedagang yang beraktivitas hingga mengganggu ketertiban umum. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Ahmad Dohiri menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah memberikan kelonggaran kepada para pedagang untuk tetap berjualan selama dua hari Lebaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kata Dohiri, setelah masa tersebut berakhir para pedagang diminta untuk tidak lagi berjualan di lokasi yang melanggar aturan yang sebelumnya telah dilonggarkan. “Bahkan sudah sampai merangsek ke badan jalan hingga hampir menutup setengah jalan,” ujar Dohiri saat diminta keterangan. Kata dia, penertiban melibatkan unsur TNI, Polri, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, serta perangkat daerah terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain penertiban, Pemkot juga mengintensifkan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum). Spanduk-spanduk imbauan dipasang di sejumlah titik untuk mengedukasi masyarakat bahwa berjualan di trotoar dan badan jalan merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. “Tidak ada kendala karena kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait Perda Ketertiban Umum (Tibum), bahwa berjualan di trotoar dan badan jalan itu melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” jelasnya. “Hari ini juga dipasang spanduk sosialisasi di beberapa titik untuk sosialisasi Perda Tibum, karena Perda Tibum ini masih baru sehingga perlu diedukasi ke masyarakat,” lanjutnya. Terkait asal pedagang, berdasarkan data kelurahan, mayoritas PKL yang ditertibkan merupakan pedagang musiman dari luar daerah, seperti Pandeglang dan Lebak. Sementara itu, sekitar 30 persen merupakan warga lokal Serpong.



PENERTIBAN: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Ahmad Dohiri menjelaskan tentang penertiban PKL Pasar Serpong.

“Tidak ada kendala karena kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait Perda Ketertiban Umum (Tibum), bahwa berjualan di trotoar dan badan jalan itu melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” jelasnya. “Hari ini juga dipasang spanduk sosialisasi di beberapa titik untuk sosialisasi Perda Tibum, karena Perda Tibum ini masih baru sehingga perlu diedukasi ke masyarakat,” lanjutnya. Terkait asal pedagang, berdasarkan data kelurahan, mayoritas PKL yang ditertibkan merupakan pedagang musiman dari luar daerah, seperti Pandeglang dan Lebak. Sementara itu, sekitar 30 persen merupakan warga lokal Serpong.

## Pemkot Tangsel Gelar Apel dan Halalbihalal Benyamin Tekankan Efisiensi Anggaran

**SATELIT NEWS,CIPUTAT**—Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie meminta aparat sipil negara (ASN) melakukan efisiensi anggaran. Khususnya pada pos belanja non fisik. Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin langsung apel dan halalbihalal Idulfitri 1447 H di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (30/3). Dalam kesempatan itu, Benyamin meminta penggunaan gas, listrik, dan air di kantor menjadi perhatian. Disusul evaluasi terhadap perjalanan dinas yang akan didorong beralih ke moda dalam jaringan (daring). “Yang saya antisipasi bukan soal lonjakan harga minyak, tetapi jika terjadi pengurangan transfer dana ke daerah ini sudah bisa kita antisipasi dari segi kegiatan daerah,” tegasnya. Benyamin juga memastikan tidak akan ada pengurangan tenaga PPPK. Efisiensi difokuskan pada belanja non-fisik, seperti perjalanan dinas yang diperketat serta kegiatan dan acara-acara pemerintahan yang akan dialihkan dari hotel ke kantor-kantor pemerintah. Meski Benyamin mengakui langkah itu berpotensi berdampak pada penerimaan pajak hotel, efisiensi belanja tetap menjadi prioritas. “Saya tidak akan mengurangi PPPK. Saya akan memerhatikan dulu pada belanja-belanja non-fisik,” katanya. Dalam arahnya, Benyamin meminta para lurah untuk menggerakkan saman-



HALALBIHALAL: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie melakukan halalbihalal bersama pegawai.

gat gotong royong warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya penanganan sampah di jalan-jalan yang kerap menumpuk usai masa libur panjang. “Tugas keseharian soal kebersihan, sampah-sampah yang ada di jalan. Lurah-lurah diharapkan mendorong kerja sama atau gotong royong masyarakat,” ujar Benyamin. Soal kehadiran ASN, Benyamin mewajibkan presensi seratus persen pada hari pertama kerja secara langsung. Kepala OPD diminta memantau absensi dan menindak pegawai yang memperpanjang libur tanpa izin atasan.

“Memperpanjang libur tanpa izin dari atasannya, minimal dapat teguran tertulis. Tegurannya akan tercatat di dalam data kepegawaiannya, dan ini akan berpengaruh terhadap kinerja ke depan,” tegasnya. Sementara itu, pantauan di lokasi, belasan ASN terlihat datang terlambat menghadiri apel. Akibatnya, para pegawai yang datang tidak waktu dilarang memasuki kawasan kantor, bahkan kendaraan mereka tertahan di depan gerbang masuk. Mereka tidak diizinkan masuk hingga apel selesai. **(eko/gatot)**

Pompa Air Penyedot Banjir Dicuri

**SATELITNEWS,TANGERANG** — Mesin pompa air berukuran besar yang berfungsi menyedot banjir di wilayah Cim-one Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, hilang digondol maling. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan RT 02/RW 08 dan baru diketahui warga saat melakukan pengecekan rutin.

Hilangnya mesin pompa ini diduga terjadi pada malam hari. Aksi pelaku luput dari pantauan karena gardu penyimpanan tidak dilengkapi kamera pengawas (CCTV). Selain itu, kondisi lokasi yang gelap turut mempermudah pelaku menjalankan aksinya tanpa diketahui warga sekitar.

Ketua RT 02, Musaropah, mengatakan mesin yang hilang merupakan fasilitas vital bagi warga dalam mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut saat hujan deras. “Yang hilang mesin pompa air untuk banjir, bentuknya seperti jetpam dengan ukuran cukup besar. Di dalam gardu ada dua mesin, tapi satu lagi aman karena ditanam,” ujarnya.

Menurutnya, mesin pompa air terse-



**DICURI:** Lokasi pompa penyedot banjir yang dicuri di kawasan Cimone, Kecamatan Karawaci.

but memiliki berat mencapai ratusan kilogram, berkisar antara 100 hingga 300 kilogram. Ukurannya yang besar dan bobotnya yang berat membuat warga menduga pelaku lebih dari satu

mengurangi genangan air yang kerap muncul saat intensitas hujan tinggi. “Kalau hujan deras, di sini sering banjir sampai setinggi paha orang dewasa. Makanya mesin pompa ini sangat dibutuhkan warga,” kata Musaropah.

Selain kehilangan mesin, kondisi gardu penyimpanan juga mengalami kerusakan cukup parah. Pintu terlihat copot dan lantai ambrol, diduga akibat proses pemindahan mesin yang berat secara paksa. “Selain mesinnya hilang, gardu juga rusak parah. Kemungkinan karena mesin yang berat itu terbanting saat dipindahkan,” tambahnya.

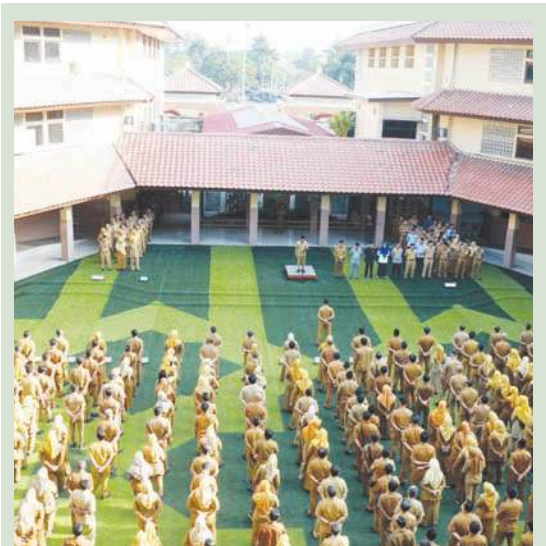
Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, pengurus lingkungan juga telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan guna mengajukan penggantian mesin ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang.

Warga berharap pemerintah segera merespons cepat kejadian tersebut. Mereka khawatir risiko banjir akan semakin besar jika fasilitas penanga-

nan air itu tidak segera dipulihkan, terutama menjelang puncak musim hujan.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni membenarkan akan adanya kehilangan pompa banjir tersebut. Taufik mengatakan, pihaknya telah melaporkan insiden kehilangan pompa banjir tersebut pada pihak kepolisian. “Kemarin kita sudah melaporkannya pada pihak kepolisian dan pihak kepolisian sudah minta data data yang diperlukna untuk penyelidikan,” ujarnya, Senin (30/3). Taufik mengatakan, pompa banjir yang hilang tersebut merupakan pengadaan tahun 2010 lalu dengan nilai sebesar Rp 37 juta.

“Pompa yang hilang itu pengadaan 2010 dengan nilai Rp 37 juta,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala DPMPSTP ini. Akibat musibah tersebut, sambung Taufik, sementara pompa banjir yang berlokasi di wilayah tersebut tidak dapat beroperasi. “Sementara pompa tidak dapat beroperasi dan akan segera diganti,” pungkasnya. (ari/made)



**APEL:** Para ASN Pemkot Tangerang saat mengikuti apel pagi di Puspemkot Tangerang.

Fokus Tangani Lonjakan Sampah Usai Lebaran

**SATELITNEWS,TANGERANG**—Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan sampah, khususnya pasca-libur panjang Idulfitri yang menyebabkan peningkatan volume di sejumlah wilayah.

Wali Kota Tangerang Sachrudin, menyoroti kondisi tersebut saat memimpin apel pagi bersama seluruh pejabat dan pegawai di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (30/03).

Menurutnya, lonjakan sampah harus segera ditangani secara cepat, terkoordinasi, dan tuntas dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah serta partisipasi aktif masyarakat. “Pasca-libur Idulfitri, volume sampah meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan memastikan penanganannya tuntas,” ujar Sachrudin.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Tangerang akan mengintensifkan kegiatan kerja bakti rutin yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah, khususnya pada hari Selasa dan Jumat. Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden.

“Kita perkuat sinergi lintas sektor dan libatkan masyarakat agar persoalan sampah bisa ditangani bersama. Target kita jelas, mewujudkan kota yang lebih bersih, sehat, indah, dan tertib,” tambahnya.

Selain fokus pada penanganan sampah, Sachrudin juga mengingatkan pentingnya disiplin dan tanggung jawab aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana memperkuat komitmen kerja.

Sachrudin pun menyampaikan optimismenya bahwa dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, berbagai tantangan, termasuk persoalan sampah, dapat diatasi demi mewujudkan Kota Tangerang yang lebih bersih dan sejahtera.

Masih dalam suasana Idulfitri, ia turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot Tangerang.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan kedinasan, saya memohon maaf lahir dan batin. Taqabballahumina minna wa minkum, taqabbal yaa Karim,” pungkasnya. Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik tingkat Kota Tangerang kepada Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Kesehatan. (made)



**SILATURAHMI KE WALI KOTA TERDAHULU**

Wali Kota Tangerang Sachrudin, beserta Wakil Wali Kota Maryono bersiap melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman sejumlah Wali Kota Tangerang dari masa ke masa. Rombongan yang juga didampingi Sekretaris Daerah dan para Kepala Perangkat Daerah tampak kompak saat bersama-sama menggunakan Bus Tayo pada Senin (30/03).

Terminal Poris Plawad Layani 5.761 Penumpang

Dalam Sepekan

**SATELITNEWS,TANGERANG**—Sebanyak 5.761 penumpang memadati Terminal Poris Plawad Kota Tangerang selama arus balik Lebaran 22-29 Maret 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4.709 penumpang.

Kepala Terminal Poris Plawad, Alwien Athena, mengungkapkan bahwa arus balik tahun ini berjalan relatif lancar meski terjadi peningkatan volume penumpang.

“Alhamdulillah, pelayanan arus balik Lebaran di Terminal Poris Plawad berjalan cukup lancar. Jumlah penumpangnya juga mengalami lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama sepekan terakhir ada 5.761 penumpang, dengan rincian 750 penumpang datang dan 5.011 penumpang berangkat,” ujar Alwien, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, pada arus balik Lebaran tahun 2025, jumlah penumpang tercatat sebanyak 4.709 orang. Kenaikan tahun ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pasca-libur Lebaran. Tak hanya jumlah penumpang, intensitas operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) juga mengalami peningkatan tajam. Berdasarkan rekapitulasi, rata-rata terdapat 160 hingga 200 armada bus yang beroperasi setiap hari selama arus balik.

Puncak arus balik terjadi pada 28 Maret 2026. Pada hari tersebut, tercatat sebanyak 191 bus diberangkatkan dan 191 bus tiba di terminal, menandai aktivitas transportasi yang sangat padat namun tetap terken-



**TERMINAL PORIS:** Kondisi Terminal Poris Plawad saat musim mudik.

dali. Menurut Alwien, peningkatan ini menjadi indikator membaiknya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi darat, khususnya layanan bus AKAP sebagai moda utama perjalanan jarak jauh.

Selain itu, keberadaan posko terpadu selama periode mudik dan arus balik dinilai efektif dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Posko tersebut menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari informasi perjalanan, layanan kesehatan, hingga pengamanan yang terintegrasi.

“Posko terpadu sangat membantu penumpang. Pelayanan menjadi lebih maksimal dan penumpang merasa lebih aman serta nyaman selama berada di terminal,” tambahnya. Dengan lonjakan ini, pengelola terminal memastikan kesiapan layanan tetap optimal, sekaligus mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur panjang berikutnya.

Terpisah, arus balik Lebaran 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, mencapai puncaknya pada Minggu (29/3). Lonjakan mobilitas penumpang terlihat signifikan, dengan total pergerakan mencapai 203.000 orang dalam satu hari.

Kepadatan penumpang terpantau di sejumlah titik, terutama di Terminal 2 kedatangan. Suasana bandara dipenuhi penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah, sekaligus mereka yang kembali melakukan perjalanan pascaliur panjang Idulfitri.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengungkapkan bahwa puncak arus balik pada H+7 Lebaran ini sesuai dengan prediksi yang telah disusun sebelumnya. Dari total 203.000 penumpang, sebanyak 108.000 merupakan penumpang datang, sementara 95.000 lainnya tercatat sebagai penumpang berangkat.

“Sejak dimulainya masa angkutan Lebaran pada 13 Maret hingga kemarin, jumlah penumpang yang dilayani di Bandara Soekarno-Hatta mencapai sekitar 2.650.000 orang,” ujar Heru, Senin (30/3/2026). Ia menambahkan, angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, jumlah penumpang pada musim angkutan Lebaran tahun ini diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta orang.

“Dari prediksi kami, jumlah penumpang pada angkutan Lebaran tahun ini akan meningkat sekitar 2,2 persen dibandingkan tahun 2025,” jelasnya. Lonjakan ini tidak hanya terlihat dari jumlah penumpang, tetapi juga dari intensitas pergerakan pesawat yang mengalami peningkatan selama periode puncak arus balik. Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama transportasi udara nasional kembali menunjukkan peran vitalnya dalam menopang mobilitas masyarakat selama momentum Lebaran.

Meski terjadi kepadatan, operasional bandara tetap berjalan lancar dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pengelola bandara, maskapai, serta otoritas terkait. Sejumlah langkah antisipatif juga telah dilakukan untuk memastikan kelancaran arus penumpang, mulai dari optimalisasi layanan hingga pengaturan alur kedatangan dan keberangkatan. Dengan masih tersisanya masa arus balik, pihak bandara mengimbau para penumpang untuk datang lebih awal serta memanfaatkan layanan digital guna mempercepat proses keberangkatan. (ari/made)





REMBUK STUNTING: Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah membuka acara Pramusrenbang Tematik Stunting (Rembuk Stunting) Kabupaten Tangerang 2026 di Hotel Yasmin, Senin (30/3).

Stunting Bukan Masalah Kesehatan Semata

SATELITNEWS,TANGERANG—Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah menegaskan permasalahan stunting merupakan tanggung jawab bersama dan tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan semata, namun juga menyangkut masa depan generasi bangsa. Penegasan itu disampaikan saat membuka acara Pramusrenbang Tematik Stunting (Rembuk Stunting) Kabupaten Tangerang 2026 di Hotel Yasmin, Senin (30/3).

“Stunting ini bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi juga menyangkut masa depan generasi kita. Anak-anak yang mengalami stunting akan menghadapi tantangan dalam tumbuh kembang, kecerdasan, hingga produktivitas di masa depan,” ungkap Intan.

Menurut dia, keberhasilan program percepatan penanganan dan penanggulangan Stunting tidak cukup hanya dengan regulasi, namun juga tergantung pada pelaksanaan program yang terintegrasi, ketepatan sasaran berbasis data yang akurat dan faktual.

“Yang paling penting adalah bagaimana implementasi di lapangan dan intervensi yang benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan data yang akurat serta terintegrasi, lintas program dan multisektor,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya konvergensi dan kolaborasi bersama untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pihaknya berharap Rembug Stunting tersebut bisa menjadi momentum bersama untuk menyatukan persepsi dan langkah konkret untuk percepatan penanganan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Tangerang.

“Kegiatan rebuk stunting ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, me-

nyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen kita dalam merencanakan program yang lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan optimal,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perangkat daerah, para camat, para pemangku kepentingan dan seluruh pihak atas kerja keras dan dedikasinya dalam rangka pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang.

“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga apa yang telah kita capai ini bisa semakin memperkuat semangat gotong royong dan mari kita pastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak dan dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Plt. Sekretaris Bappeda, Sri Indriastuti mengatakan bahwa pramusrenbang Rembuk Stunting tahun 2026 bertujuan untuk membahas hasil kinerja konvergensi stunting sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja percepatan penurunan dan pencegahan stunting tahun berikutnya dan mempertajam sasaran utama penerima manfaat.

“Percepatan penurunan stunting sasaran utamanya adalah ibu hamil, balita, baduta, remaja putri calon pengantin dan semua rumah tangga atau masyarakat terutama mereka yang masuk di dalam keluarga risiko stunting. Jadi intervensinya tidak hanya kepada anak balitanya tetapi mulai kepada mereka yang masih remaja putri, menjadi calon pengantin, ibu hamil dan seterusnya,” jelasnya. (alfian/aditya)

“

Stunting ini bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi juga menyangkut masa depan generasi kita. Anak-anak yang mengalami stunting akan menghadapi tantangan dalam tumbuh kembang, kecerdasan, hingga produktivitas di masa depan

Intan Nurul Hikmah | Wakil Bupati Tangerang



DIWAWANCARAI: Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid didampingi Sekda dan Ketua DPRD, saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Senin (30/3/2026).

Pemkab Siapkan Penghematan Listrik

Dampak Konflik Timur Tengah

TANGERANG,SATELITNEWS – Mema-suki pekan keempat konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, dampak krisis energi mulai dirasakan hingga ke Indonesia, termasuk di Kabupaten Tangerang. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerint-ah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menerapkan efisiensi energi dengan menghemat penggunaan listrik di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (30/3/2026).

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, langkah penghe-matan ini telah dibahas bersama Sek-retaris Daerah dan akan segera diterap-kan di lingkungan pemerintahan. “Saya sudah bicara dengan Pak Sekda, supaya semua OPD yang kira-kira bisa dihemat energi listriknya, kita hemat,” kata Mae-syal kepada Satelit News.

Pria yang akrab disapa Rudi Maesyal itu menjelaskan, kebijakan ini bertu-juan mendorong kesadaran seluruh aparat sipil negara (ASN) agar lebih bijak dalam menggunakan energi, khu-susnya listrik. Upaya efisiensi tersebut dapat dilakukan di masing-masing ling-kungan kerja guna menekan anggaran pembayaran listrik di tengah situasi kri-sis global.

Namun demikian, penghematan ti-dak akan diberlakukan secara menyelur-uh. Sejumlah OPD yang memberikan layanan langsung kepada masyara-kat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), periz-inan, hingga rumah sakit, tetap berop-erasi normal.

“Tapi khusus untuk OPD pelayanan tidak mungkin kita matikan listriknya, seperti Disdukcapil, Bapenda, itu tidak mungkin juga. Ya, ada jam-jam tertentu kepada mereka,” ungkapnya.

Selain penghematan listrik, Pemkab Tangerang juga mempertimbangkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) bagi ASN. Langkah ini dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis energi global.

Meski demikian, pelaksanaan WFH masih dalam tahap kajian dan menung-gu arahan resmi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Pemkab Tangerang semp-at menerapkan skema WFH sebesar 50 persen pasca-Lebaran.

“Sudah kita tentukan untuk WFH-WFA-nya, tapi nanti secara resminya kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” paparnya.

Ia menegaskan, kebijakan WFH tidak akan berlaku bagi layanan publik yang bersifat esensial, seperti rumah sakit, transportasi, keamanan, dan penang-gulangan bencana, yang tetap harus beroperasi penuh demi menjaga pelay-anan kepada masyarakat.

“Nah, sekarang kita menunggu dari pemerintah pusat, terkait dengan kes-eragamannya supaya semua kabupat-en/kota ini sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepega-waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat, menambah-kan bahwa hingga saat ini kebijakan WFA belum diterapkan di Kabupaten Tangerang, karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Masih belum, karena masih menunggu arahan pemerintah pusat,” singkat Beni.

BBM dan LPG 3 Kg Masih Aman

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang, Rizky Maria Puspita Gir-sang, mengungkapkan bahwa dampak dari konflik Timur Tengah di sektor BBM dan LPG untuk wilayah Kabupat-

en Tangerang masih tergolong aman.

“Stok BBM kita masih tersedia, aman. Ini hasil rapat koordinasi kami dengan Hiswana Migas saat momen ramadan dan lebaran Idul Fitri. Beberapa harga komoditas bahan pokok pun masih terpantau stabil pascalebaran ini,” un-gkap Rizky kepada Satelit News, Senin (30/3/2026).

Terkait dengan gas LPG, Rizky, me-nyebutkan bahwa pasokan gas LPG, khususnya yang 3 kilogram dan bersub-sidi, masih dalam kondisi aman hingga Lebaran kemarin, dan belum ada infor-masi terbaru yang menunjukkan adan-ya kendala.

“Gas LPG masih aman, stok gas 3 kilo subsidi masih terjaga dengan baik. Kami belum menerima informasi ter-baru, tapi setidaknya sampai Lebaran kemarin, stok gas LPG masih aman,” katanya.

Meski begitu, Rizky mengakui baha-wa dampak dari ketegangan di Timur Tengah dapat mempengaruhi harga komoditas dan inflasi. Harga sejumlah barang memang sempat naik, terutama pada saat menjelang Lebaran, namun menurutnya, harga-harga tersebut su-dah kembali normal.

“Memang ada kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti daging, tetapi setelah Lebaran, harga-harga kembali stabil. Permintaan yang menu-run pasca lebaran membuat harga-ha-ga kembali normal,” jelas Rizky.

Menanggapi pertanyaan tentang in-struksi dari pemerintah pusat terkait krisis energi ini, Rizky mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada eda-ran atau instruksi resmi yang diterima oleh pihaknya.

“Belum ada instruksi resmi dari pusat. Kami hanya menerima imbauan melalui media agar masyarakat tidak panik. Kalau ada kebijakan lebih lanjut, kami akan menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat,” tambah Rizky. (alfian/aditya)

Apresiasi Kinerja Pemkab Disertai Catatan Strategis

DPRD Soroti LKPJ Bupati Tahun 2025

SATELITNEWS,TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

Dalam forum tersebut, suasana sidang berlangsung dinamis. Fraksi-fraksi DPRD secara umum memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2025. Namun, di balik apresiasi tersebut, sejumlah catatan strategis turut disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah selama satu tahun anggaran. “Pada hari ini DPRD Kabupaten Tangerang melaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas capaian target kinerja di tahun 2025,” ujar Amud.

Ia menjelaskan, berbagai masukan yang disampaikan fraksi bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna mendorong kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. “Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi merupakan wujud pelaksanaan



RAPAT PARIPURNA: Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (30/3/2026).

fungsi pengawasan DPRD, sekaligus sebagai bahan perbaikan bagi pemerint-ah daerah,” tambahhya.

Lebih lanjut, Amud mengungkapkan bahwa pembahasan LKPJ tidak ber-henti pada rapat paripurna ini. Taha-pan berikutnya akan dilakukan pembahasan lebih mendalam bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, agar evaluasi dapat berjalan secara komprehensif dan berbasis data.

“Pembahasan lebih lanjut akan di-lakukan dalam waktu dekat bersama seluruh anggota DPRD dan pemerintah daerah agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih detail dan terukur,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan DPRD dalam forum tersebut. “Seluruh masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti, dan hasilnya

akan kami sampaikan secara formal pada pembahasan selanjutnya dalam rapat paripurna berikutnya,” ujar Mae-syal.

Ia menegaskan, proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam siklus evaluasi tahunan pembangunan daerah, yang nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ke depan.

“Hasil pembahasan LKPJ ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan di tahun berikutnya,” pungkasnya.

Fraksi Golkar Tekankan Evaluasi untuk Perbaikan

Dalam sidang paripurna yang ber-langsung di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (30/3/2026), Bimo Mahfudz Fudianto, anggota Fraksi

Partai Golkar, membacakan Pandan-gan Umum Fraksi Golkar terkait Lapo-ran Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Bimo menyampaikan pandangan Fraksi Golkar, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, yang mengha-ruskan Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ tersebut, menurutnya, sudah dis-ampaikan oleh Bupati Tangerang pada sidang paripurna sebelumnya.

“Setelah mencermati penyampaian LKPJ Kepala Daerah, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa pan-dangan yang perlu dicatat,” ujar Bimo, dalam rapat paripurna.

Pada sisi anggaran, target pendapa-tan untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,7 triliun tercatat melebihi ekspektasi, dengan realisasi mencapai Rp 9,052 triliun atau 103,61%. Kenaikan ini se-bagian besar disebabkan oleh lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat 104,56% atau sekitar Rp 5,3 tril-iun lebih.

“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kenaikan PAD yang signifikan, yang jelas menunjukkan adanya kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi daerah. Ini adalah langkah positif yang patut dipertahankan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bimo memaparkan baha-wa pada sisi belanja daerah yang diren-canakan sebesar Rp 9,4 triliun, tereal-isasi Rp 9,1 triliun atau 96,24%. Hal ini, menurutnya, mencerminkan optimasi anggaran yang dikelola dengan baik un-

tuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Di sektor pembiayaan, dengan ren-cana sebesar Rp 758,1 miliar, Pemkab Tangerang berhasil merealisasikan 100% dari anggaran yang dipersiapkan. Pencapaian ini, menurut Bimo, menan-dakan ketepatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Selain itu, penerimaan bantuan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 917,9 miliar, tercatat terpakai hampir sepenuhnya, yakni sebesar Rp 917,5 miliar atau 99,96%. Ini menunjukkan adanya ker-jasama yang solid antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Namun, meskipun pencapaian ang-garan tersebut patut diapresiasi, Bimo juga menyoroti bahwa masih ada pro-gram-program dari Organisasi Perang-kat Daerah (OPD) yang perlu perbaikan lebih lanjut. Ia menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar kinerja yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan.

“Fraksi Partai Golkar berharap se-luruh OPD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap apa yang telah dikerjakan. Setiap OPD perlu melakukan perbaikan internal sehingga hasil yang dicapai dapat dipertang-gungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Sebagai langkah lanjutan, Fraksi Par-tai Golkar berencana untuk membahas lebih mendalam mengenai LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama OPD terkait, agar dapat memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai harapan. (aditya)

# Pemprov Pastikan Program Sekolah Gratis Dibayar

**SATELITNEWS, SERANG**—Setelah sempat mengalami keterlambatan pembayaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa pekan ini anggaran Program Sekolah Gratis dipastikan akan dibayarkan. Hal itu sebagaimana diutarakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin yang menegaskan bahwa proses pengusulan pencairan sudah dilakukan dan kini hanya tinggal menunggu koordinasi

teknis dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD). “Sudah diusulkan, tinggal nunggu aja. Sekarang sudah diusulkan, ini mau cair lagi nih In-sya Allah di minggu ini,” ujarnya, Senin (30/3).

Terkait keterlambatan yang terjadi sebelumnya, Jamaluddin menjelaskan bahwa hal tersebut dipicu oleh proses validasi data agar anggaran yang dikurirkan tepat sasaran.

“Kendalanya kan berkaitan dengan keakuratan data dan lain

sebagainyalah, ya. Tapi In-sya Allah ini udah selesai, bulan ini untuk yang Februari udah mau dicairkan, nanti selanjutnya (bulan Maret, red) kita nunggu dari BPKAD,” jelasnya.

Dia menuturkan bahwa evaluasi rutin terus dilakukan, terutama menyangkut fluktuasi jumlah siswa di setiap sekolah. Hal ini, kata dia, penting untuk memastikan tidak ada anggaran yang mengalir ke siswa yang sudah pindah atau mengundurkan diri. **(mpd/rmg)**

# Amir Hamzah Mengaku Kecewa

**■BUPATI LEBAK...**  
*Sambungan dari hal 1*

Amir mestinya bersyukur meski latar belakangnya seperti itu namun kini sudah nasibnya sudah jauh lebih baik karena menjadi Wakil Bupati Lebak.

“Uyuhun mantan napi jadi wakil bupati geh bersyukur (Masih mending mantan napi jadi wakil bupati juga bersyukur),” ucapnya di hadapan Amir Hamzah langsung.

Mendengar pernyataan tersebut Amir yang sedari awal hadir dalam acara Halalbihalal segera berdiri meninggalkan lokasi. Sempat terjadi kepanikan di sekitar acara. Sebab, sejumlah pegawai di lokasi mengira akan terjadi keributan pada saat Amir Hamzah berdiri dari tempat duduknya. Mereka bertindak memisahkan Hasbi dengan Amir guna meminimalisir potensi keributan.

Setelah insiden tersebut, rangkaian acara halalbihalal tetap dilanjutkan. Bupati Hasbi meneruskan kegiatannya dengan bersalaman bersama para ASN dan ditutup dengan sesi makan bersama.

Namun, Wakil Bupati Amir Hamzah tidak tampak mengikuti rangkaian penutup kegiatan tersebut. Usai acara, Hasbi berkilah bahwa pernyataannya merupakan bagian dari gaya komunikasi dan intonasi bicarannya. Ia menyebut status masa lalu Amir justru sebuah prestasi karena bisa bangkit hingga menjabat sebagai wakil bupati. “Itu memang intonasi saya seperti itu. Pak Amir Hamzah juga pernah mendapat penghargaan,”

kata Hasbi.

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah tak mampu menyembunyikan kekecewaannya usai pernyataan Bupati Hasbi Jayabaya. Ia merasa dipermalukan karena persoalan pribadi dibawa ke ruang publik yang tidak berkaitan dengan tugas pemerintahan.

“Kalau hanya menyebut nama saya mungkin biasa. Tapi ketika menyebut saya mantan narapidana di depan umum, itu sudah masuk penghinaan,” ujar Amir.

Tak lama setelah pernyataan itu dilontarkan, Amir mengaku emosinya memuncak. Ia bahkan berdiri dari tempat duduknya untuk menyampaikan keberatan secara langsung kepada bupati.

“Saya bangkit ingin menyampaikan agar tidak berbicara seperti itu. Tapi saya ditahan oleh beberapa pihak. Istri saya juga menenangkan, bahkan anak-anak saya diminta pulang,” katanya.

Menurut Amir, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan gaya bicara atau intonasi, melainkan menyangkut substansi ucapan yang dinilai tidak pantas disampaikan dalam forum resmi.

“Ini bukan soal intonasi. Ini soal isi pembicaraan yang merendahkan. Disampaikan di depan umum dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa kesempatan, ia merasa komunikasi dari Bupati kerap disampaikan dengan cara yang kurang etis.

“Ini sudah yang kedua kali. Bahkan dalam rapat-rapat dinas juga sering ada bahasa yang

menurut saya tidak layak,” ungkap Amir.

Meski demikian, Amir memastikan dirinya tetap akan menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Saya tetap bekerja. Kasihan masyarakat, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Terkait kemungkinan mundur dari jabatannya, Amir menyatakan masih akan melihat perkembangan situasi ke depan.

“Nanti kita lihat situasi. Ini kan baru setahun menjabat,” katanya.

Ia pun menegaskan pentingnya etika dan tata krama dalam berkomunikasi, khususnya bagi pejabat publik dalam forum resmi.

“Kita ini pejabat, ada etika, ada tata krama. Harus melihat situasi dan konteks. Jangan sampai ucapan justru melukai dan merusak suasana,” tandasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung lemahnya koordinasi di internal pemerintahan. Menurutnya, komunikasi dengan bupati kerap tidak berjalan baik.

“Koordinasi susah, bukan hanya dengan saya, dengan pihak lain juga,” katanya.

Diketahui, Amir Hamzah dihukum 3 tahun dan 5 bulan penjara dalam kasus suap hakim konstitusi sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan sengketa hasil pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan denda kepada keduanya Rp 150 juta subsidair 2 bulan kurungan. **(mulyana/gatot)**

# Dibuang Secara Sembunyi-Sembunyi

**■TIMBULANSAMPAH...**  
*Sambungan dari hal 1*

“Sekarang nutup jalan, jadi kadang suka macet juga karena sampah itu,” katanya.

Yusuf menduga sampah-sampah tersebut dibuang secara sembunyi-sembunyi oleh oknum tidak bertanggung jawab, terutama pada malam hari. Hal ini lantaran tidak pernah terlihat aktivitas pembuangan di siang hari.

“Mungkin malam dia buangnya, jadi nggak diketahui warga. Kalau siang mungkin takut,” ucapnya.

Ia memperkirakan pelaku menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk membuang sampah secara cepat di lokasi tersebut.

Kondisi ini juga berdampak langsung terhadap aktivitas pekerjaan proyek di sekitar area. Yusuf mengaku harus bekerja di tengah bau tak sedap yang cukup mengganggu.

“Bau, memang bau. Tapi ya mau gimana lagi, namanya kerja, saya terima saja,” katanya.

Meski demikian, pekerjaan tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian. Sampah yang menghalangi area kerja terpaksa digeser secara manual agar proses pengecoran tetap bisa dilakukan.

“Kita akal-akalin saja, sampahnya digeser sedikit-sedikit biar bisa kerja,” ujarnya.

Lurah Pasir Jaya, Ardi Irawan, menegaskan bahwa lokasi terse-

but bukan merupakan tempat pembuangan sampah (TPS) resmi. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat membuat area tersebut kerap dijadikan lokasi pembuangan liar.

“Lokasi tersebut bukan TPS. Namun karena kesadaran masyarakat yang masih kurang, sehingga masih banyak yang membuang sampah di sana,” ujarnya.

Ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pemasangan spanduk larangan hingga koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang untuk pengangkutan rutin.

“Kami sudah pasang imbauan, melakukan penyisiran sampah rutin bersama DLH, serta menginstruksikan RT dan RW untuk mengingatkan warganya,” katanya.

Selain itu, kerja bakti bersama warga juga telah dilakukan guna menjaga kebersihan lingkungan. Namun, upaya tersebut belum mampu menghentikan praktik pembuangan liar.

Ardi mengungkapkan, pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh truk DLH. Ironisnya, tumpukan sampah kerap kembali muncul hanya dalam hitungan jam setelah dibersihkan.

“Setiap hari diangkut, tapi siang atau sore sampah muncul lagi. Ada saja yang buang di situ,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagian besar pelaku bukanlah warga

setempat, melainkan pengguna jalan yang melintas dan dengan sengaja membuang sampah dari kendaraan.

“Kebanyakan yang buang itu warga yang melintas, pakai motor atau mobil, langsung melempar sampah,” jelasnya.

Kepala DLH Kota Tangerang, Wawan Fauzi, memastikan timnya terus bekerja di lapangan untuk menangani persoalan tersebut, meskipun dirinya tidak berada langsung di lokasi saat proses penanganan berlangsung.

“Saya tidak di lokasi, tapi saya percaya tim saya sedang terus bekerja,” ujarnya.

Ke depan, DLH berencana melakukan penutupan akses di titik tersebut setelah proses pengangkutan rampung, guna mencegah lokasi kembali dijadikan tempat pembuangan liar.

“Rencana kami seperti itu,” kata Wawan.

Ia menegaskan, penanganan masalah sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk aparat wilayah dan masyarakat.

“Pastinya kami akan berkoordinasi dengan aparatur kewilayahan, karena ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, Yusuf berharap kondisi jalan dapat segera kembali normal agar aktivitasnya tidak lagi terganggu.

“Harapannya sih cepat bersih lagi, biar kerja juga enak,” katanya. **(ari/gatot)**

# 472 CPNS 2024 Resmi Jadi PNS

**■MAESYAL RASYID...**  
*Sambungan dari hal 1*

“Ini lagi Satpol PP, bukannya bantu rapikan barisan malah pada di sini. Cepat masuk barisan!” tambah Rudi, sapaan Maesyal Rasyid sambil mengerutkan dahinya, tampak tak senang dengan sikap para petugas.

Dalam apel tersebut, sebanyak 472 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tangerang resmi dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bupati Tangerang. Pelantikan ini menandai langkah baru bagi para ASN tersebut dalam menjalankan tugas di pemerintahan, dengan rincian 252 orang ditempatkan di sektor kesehatan dan 220 orang di sektor teknis.

Maesyal menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari formasi PNS tahun 2024. Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa menjadi seorang ASN bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk mengabdikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia pun meminta kepada

seluruh ASN yang baru dilantik untuk senantiasa menjaga disiplin, integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Menjadi ASN bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang pengabdian. Disiplin dan integritas sangat penting, karena keduanya menjadi dasar untuk menghasilkan kerja yang optimal. Jika kita ingin memberikan pelayanan yang maksimal, maka kita harus disiplin, taat aturan, dan menjalankan kewajiban dengan baik,” ujar Rudi.

Lebih lanjut, Bupati Tangerang menyoroti pentingnya budaya disiplin di kalangan ASN. Salah satunya, melalui pelaksanaan apel pagi yang akan menjadi salah satu indikator evaluasi ke-disiplinan.

Rudi menyatakan, dalam waktu satu minggu, ia akan mengevaluasi tingkat kehadiran para pegawai. Jika tingkat kehadiran masih rendah, ia tidak akan ragu untuk menerapkan kebijakan apel pagi setiap hari.

“Saya akan evaluasi selama satu minggu. Jika tingkat kehadiran masih belum optimal, maka

apel pagi akan dilaksanakan setiap hari. Ini demi meningkatkan kinerja dan semangat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Rudi juga mengingatkan agar Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM), serta Inspektorat menegakkan aturan kepegawaian tanpa kompromi. ASN yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada,” tambahny.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, turut menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan. Pihaknya akan bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Tentunya, kami tidak akan segan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku bagi ASN yang melanggar,” tandas Soma. **(alfian/aditya)**

# Setiap Rumah Terima Bantuan Rp20 Juta

**■1.308 RUMAH...**  
*Sambungan dari hal 1*

tersebut dinilai telah menyentuhkan masyarakat yang membutuhkan.

“Kita melakukan tinjauan langsung ini tujuannya agar bisa melihat langsung apakah bantuan ini benar-benar tepat sasaran, dan ternyata memang tepat sasaran. Tentu saya senang sekali, tadi kita bisa saksiikan langsung kondisi rumahnya,” kata Maruarar, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, terdapat sekitar tiga unit rumah di Desa Pete yang ditinjau secara langsung. Kondisi ketiganya dinilai sangat tidak layak huni sehingga membutuhkan penangangan segera melalui program perbaikan.

“Yang kita tinjau tadi ada tiga unit, tepatnya di Desa Pete Kecamatan Tigaraksa. In-sya Allah, April 2026 ini langsung dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, program BSPS di Kabupaten Tangerang mencakup 1.308 unit rumah

yang tersebar di 20 kecamatan, dengan masing-masing unit mendapatkan bantuan Rp20 juta.

“Setiap unit mendapatkan bantuan Rp20 juta. Total keseluruhan di Kabupaten Tangerang terdapat 1.308 unit yang tersebar di 20 kecamatan,” ungkapnya.

Maruarar berharap program ini dapat mengurangi bahkan menghapus keberadaan rumah tidak layak huni, khususnya di Kabupaten Tangerang. Ia juga menilai adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

“Semoga ini menjadi sinergitas yang apik antara pemerintah daerah dengan pusat dalam menciptakan hunian yang layak untuk masyarakat,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, merinci sebaran bantuan BSPS di 20 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Tigaraksa 21 unit, Kemiri 10 unit, Kronjo 64 unit, Gunung Kaler 75 unit, Rajeg 68 unit, Jayanti 43 unit, Balaraja 34 unit, Cisoka 167 unit,

Solear 63 unit, Jambe 65 unit, Pakuhaji 15 unit, Teluknaga 198 unit, Sepatan 199 unit, Sepatan Timur 10 unit, Pasar Kemis 40 unit, Cikupa 40 unit, Pagedangan 35 unit, dan Cisauk 13 unit.

“Jadi total dari 20 kecamatan, terdapat 1.308 unit yang mendapatkan program bantuan bedah rumah,” katanya.

Soma menambahkan, selain program BSPS, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Sepanjang tahun 2025, sebanyak 1.197 unit rumah telah berhasil diperbaiki menjadi layak huni.

“Tahun lalu kita berhasil memperbaiki 1.197 rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Di tahun 2026 ini juga kita terus bergerilya memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak. Dengan adanya program BSPS ini, akan menjadi kolaborasi yang apik untuk menciptakan rumah layak bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang,” harapnya. **(alfian/aditya)**

# Diklaim Tanpa Gangguan Signifikan

**■147,5 JUTA...**  
*Sambungan dari hal 1*

tahun lalu. Di tengah dinamika itu, angka kecelakaan dan fatalitas tercatat turun signifikan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, total pergerakan masyarakat selama periode 13–29 Maret 2026 mencapai 147,55 juta orang berdasarkan mobile positioning data (MPD). Angka ini melampaui proyeksi awal sebesar 143,92 juta orang, atau naik 2,53 persen dari hasil survei.

“Untuk pergerakan orang mencapai 147,55 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 2,53 persen dari hasil survei,” ujar Dudy saat menutup Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026).

Namun demikian, secara tahunan jumlah pemudik justru turun 4,57 persen dari sekitar 154,62 juta orang pada 2025. Dudy menyebut faktor di balik penurunan dibanding tahun lalu tersebut masih perlu dikaji.

“Mungkin terdapat kondisi-kondisi yang membuat masyarakat memiliki pertimbangan dalam melakukan perjalanan,” katanya.

Di sisi keselamatan lalu lintas, peningkatannya terlihat lebih jelas. Data Korlantas Polri melalui Integrated Road Safety Management System (IRSMS) mencatat 3.517 kejadian kecelakaan selama periode Lebaran 2026. Angka itu turun 6,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan lebih tajam terjadi pada fatalitas. Jumlah korban meninggal dunia turun 31,19 persen, sementara korban luka berat berkurang 13,80 persen.

“Yang paling membahagiakan... terjadi penurunan angka kecelakaan sebesar 6,31 persen dan fatalitas turun cukup besar sebesar 31,19 persen,” ujar Dudy.

Ia menegaskan, capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, sekaligus menjadi indikator awal perbaikan keselamatan transportasi. Namun evaluasi tetap diperlukan. “Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi,” katanya.

Sementara itu, penggunaan angkutan umum meningkat secara signifikan. Peningkatan ini menunjukkan peran transportasi publik yang semakin besar dalam menopang mobilitas Lebaran yang padat.

Selama periode Lebaran, jumlah penumpang mencapai 23,54 juta orang atau naik 10,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi di seluruh moda.

Moda angkutan jalan melayani 3,89 juta penumpang (naik 11,64 persen), angkutan laut 2,02 juta penumpang (naik 9,86 persen), dan transportasi udara 4,77 juta penumpang (naik 6,97 persen).

Pemudik kereta api mencatat 7,31 juta penumpang (naik 10,13 persen). Sementara penyeberangan menjadi yang tertinggi dengan 5,52 juta penumpang atau naik 15,36 persen.

Dari sisi lalu lintas, sebanyak

2,96 juta kendaraan tercatat keluar dari Jabodetabek selama periode mudik, naik sekitar 4 persen dibandingkan tahun lalu. Arus terbesar menuju arah timur sebesar 51,5 persen, disusul barat 26,5 persen dan selatan 22 persen.

Pada arus balik, 2,70 juta kendaraan tercatat masuk ke Jabodetabek, turun tipis 0,4 persen. Distribusinya didominasi dari arah timur (48 persen), kemudian barat (28,3 persen), dan selatan (23,5 persen).

Kelancaran lalu lintas juga tercermin dari kecepatan rata-rata perjalanan Jakarta–Semarang yang mencapai 81,60 kilometer per jam selama masa mudik.

Secara umum, Dudy menilai penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 berjalan lancar tanpa gangguan signifikan. Ia menekankan keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi.

“Alhamdulillah, kolaborasi yang sangat baik, sehingga Angkutan Lebaran tahun ini berjalan dengan baik dan tidak ada hal signifikan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suintana, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Mohammad Syafii, beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. **(rmg/xan)**



# Harga Bahan Pokok Mulai Stabil

**SATELITNEWS, LEBAK**—Setelah perayaan Idul Fitri 2026, harga bahan pokok di Kabupaten Lebak mulai menunjukkan tren stabil. Sejumlah komoditas utama terpantau mengalami penurunan harga setelah sebelumnya sempat merangkak naik menjelang hari raya.

Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional, harga cabai merah besar kini berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram, cabai merah keriting Rp36 ribu per kilogram, serta beras medium di angka Rp12.800 per kilogram. Penurunan ini menjadi indikasi mulai normalnya kondisi pasar pasca-Lebaran.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan bahwa stabilisasi harga ini dipengaruhi oleh menurunnya tingkat permintaan masyarakat setelah momen Lebaran berakhir.

“Daging ayam juga sudah kembali normal di kisaran Rp40 ribu per kilogram. Secara umum, harga kebutuhan pokok pada H+1 hingga H+7 Lebaran mengalami penurunan karena permintaan masyarakat mulai berkurang,” ujarnya, Senin (30/3).

Selain faktor permintaan, kelancaran distribusi barang juga turut berperan dalam menjaga stabilitas harga di pasaran. Aktivitas konsumsi masyarakat yang kembali normal membuat pergerakan harga lebih terkendali dibandingkan saat puncak kebutuhan Lebaran.

Dalam upaya menjaga kestabilan tersebut, Disperindag Lebak terus melakukan pemantauan secara intensif dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Polres Lebak.

“Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali, pasokan aman, serta memberikan rasa

tenang kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok,” kata Yani.

Melalui sinergi lintas instansi ini, pemerintah berharap kondisi pasar tetap kondusif dan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan dalam waktu dekat. Selain itu, daya beli masyarakat juga diharapkan tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi pasca-Lebaran.

“Yang terpenting daya beli masyarakat tetap stabil,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Endang, salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional. Ia mengaku, harga sejumlah komoditas memang mulai turun dan aktivitas pembeli tidak seramai saat menjelang Lebaran.

“Sekarang sudah mulai sepi pembeli, jadi harga juga ikut turun. Cabai sama beras sudah lebih stabil dibanding kemarin sebelum Lebaran,” kata Endang. **(mulyana/gatot)**



**HARGA BAHAN POKOK:** Pedagang dan pembeli melakukan transaksi di pasar tradisional. Harga bahan pokok di Kabupaten Lebak mulai stabil seiring menurunnya permintaan konsumen.

## Miskin Tapi Tak Pernah Dapat Bantuan

**SATELITNEWS, LEBAK**--Program bantuan sosial terus digulirkan pemerintah. Namun di sudut lain Kabupaten Lebak, seorang lansia justru luput dari perhatian. Di usia 70 tahun, Sukmariah yang terdeta sebagai warga miskin dengan keterbatasannya tak mendapatkan bantuan tersebut dan hanya mengandalkan belas kasih dan harapan yang tak kunjung pasti.

Derasnya hujan yang mengguyur Kampung Pasir Haleuang, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, tak hanya membasahi tanah, tetapi juga menambah beban hidup Sukmariah (70). Dari atap rumahnya yang bocor, air menetes tanpa henti, bahkan kerap menggenangi dapur sederhana tempat ia memasak.

Di tengah gencarnya penyaluran bantuan sosial seperti program kesra, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sukmariah justru seperti luput dari daftar penerima. Perempuan lanjut usia itu mengaku, bantuan terakhir yang ia rasakan hanya datang sekali, yakni saat pandemi Covid-19. Setelah itu, tak ada lagi bantuan yang menghampiri kehidupannya.

“Pernah dapat waktu Corona saja, itu juga sudah lama. Setelah itu tidak pernah lagi,” ujarnya lirih, Senin (30/3).

Sejak ditinggal wafat suaminya sekitar 15 tahun lalu, Sukmariah hidup seorang diri. Di usia senja, tubuhnya tak lagi kuat untuk bekerja. Untuk berjalan pun ia harus bertumpu pada tongkat. Hari-harinya bergantung pada kebaikan orang lain. Anak, tetangga, dan kerabat menjadi tempat ia berharap. Namun, tak setiap hari bantuan itu datang. “Kalau ada yang memberi, ya makan. Kalau tidak, ya seadanya,” tuturnya pelan.

Kondisi rumah yang ditempatinya pun jauh dari kata layak. Selain bocor saat hujan, bangunan itu juga rawan diterpa angin kencang. Setiap kali cuaca memburuk, rasa cemas tak pernah absen. “Kalau hujan itu bukan bocor lagi, sudah seperti banjir di dapur. Kalau angin besar juga takut,” katanya.

Di tengah keterbatasan itu, Sukmariah tak banyak menuntut. Ia hanya menyimpan harapan sederhana mendapat perhatian agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. “Harapannya ingin dapat bantuan, tapi saya tidak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Desa Tambakbaya, Robi, mengaku berdasarkan data yang ada, Sukmariah tercatat masuk dalam kategori Desil 2, yakni kelompok masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan. “Kalau menurut data yang tadi saya cek, Ibu Sukmariah masuk ke Desil 2. Tapi saya juga heran kenapa tidak dapat bantuan. Ini akan kami cek kembali, apakah memang masuk kriteria atau belum. Nanti akan dilakukan pendataan ulang,” ujarnya. **(mulyana/made)**



**BELUM DAPAT BANTUAN:** Sukmariah (70) warga Kampung Pasir Haleuang, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang luput dari perhatian pemerintah.



### TIDAK DISIPLIN

Ketidakdisiplinan pengguna jalan kerap terjadi persimpangan lampu merah masuk Gerbang Tol Rangkasbitung Tol Serang-Panimbang. Kehadiran lampu merah yang seharusnya menjadi tanda berhenti justru kerap diabaikan. Sejumlah pengendara, baik roda dua maupun roda empat, nekat menerobos saat lampu lalu lintas masih menyala merah, Senin (30/3).

## Kasus Stunting Naik 530 Anak

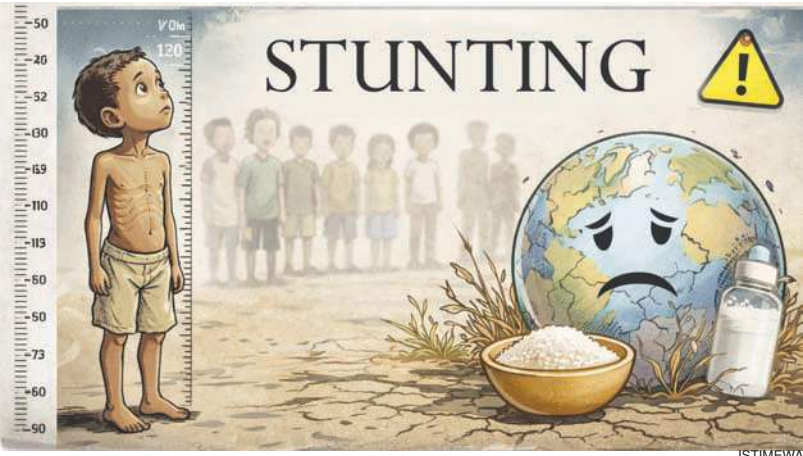
### Data Diduga Anomali

**SATELITNEWS, LEBAK**—Kasus stunting di Kabupaten Lebak pada 2025 dilaporkan mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data sementara, terdapat penambahan sebanyak 530 anak yang terindikasi mengalami stunting.

Data yang dihimpun menyebutkan, pada 2024 jumlah kasus stunting tercatat sebanyak 4.154 anak. Namun pada 2025, angka tersebut meningkat menjadi 4.684 anak. Lonjakan ini pun menjadi sorotan karena dinilai tidak wajar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, mengungkapkan, pihaknya saat ini masih melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut.

“Data hasil input operator di tingkat posyandu dan desa saat ini sedang kami kroscek. Kemarin, Pak



### ILUSTRASI.

Sekda juga sudah meminta Dinas Kesehatan untuk mengklarifikasi data itu,” ujar Widy, Senin (30/3).

Menurutnya, kenaikan kasus stunting tersebut tidak merata di seluruh wilayah, melainkan terlokalisir di sejumlah wilayah kerja puskesmas tertentu.

“Kenaikannya terlokalisir di beberapa puskesmas seperti Pajagan,

Cikulur, dan Bayah. Di sana angka kenaikan cukup besar,” katanya.

Widy menjelaskan, verifikasi mendalam perlu dilakukan karena ditemukan indikasi anomali dalam data yang dilaporkan. Bahkan, kenaikan di beberapa wilayah disebut mencapai angka yang cukup tinggi.

“Ada yang anomali karena kenaikannya sampai 10 hingga 32 persen.

Makanya teman-teman di Dinas Kesehatan akan kroscek terlebih dahulu. Kami khawatir ada pemahaman petugas atau operator yang tidak terstandar,” jelasnya.

Ia menambahkan, lonjakan angka yang cukup besar dalam waktu singkat dinilai tidak logis, sehingga perlu validasi lebih lanjut agar data yang dihasilkan benar-benar akurat.

“Bisa karena pemahaman petugas, atau mungkin juga faktor lain seperti kerusakan alat. Karena tidak mungkin ada penambahan sampai 500 atau 700 kasus dalam waktu singkat. Kita butuh verifikasi data itu,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak belum dapat dikonfirmasi terkait lonjakan angka stunting tersebut.

Pemerintah daerah memastikan proses klarifikasi dan validasi data akan terus dilakukan guna memastikan penanganan stunting berjalan tepat sasaran. **(mulyana/gatot)**

KARIR

RAGAM

PROPERTI

FURNITURE

LOTOMOTIF

LOKER

ELEKTRONIK

KEHILANGAN

USAHA

IKLAN BARIS & MINI KOLOM

Info Pemasangan Iklan:  
021-55752453 | 021-55743519  
0813 1687 4363 | 0815 965 3773

KEHILANGAN

**TELAH HILANG SURAT TANAH :** AKTA JUAL BELI (AJB) NO. 172 / 2009. DIKELUARKAN KANTOR PPATS KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN. PERSIL NO. 6111 BLOK 013.3733.0 KOHIR 1791, AN. DEDY SELUAS 28 M<sup>2</sup>. LOKASI PRIYANG RT 005 RW 002 KELURAHAN PONDOK JAGUNG KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN.

**TELAH HILANG 1(SATU) BERKAS** AKTA JUAL BELI (AJB) UNTUK BPN NOMOR: 386/SDJ/IX/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 AN. PEMBELI : MULYANTO, LETAK TANAH KECA-

LOTOMOTIF

**TELAH HILANG 1(SATU) BERKAS** AKTA JUAL BELI (AJB) UNTUK BPN NOMOR: 148/SDJ/IX/2022 TANGGAL 30 MEI 2022 AN. PEMBELI : NURALIM, LETAK TANAH KECAMATAN SINDANG JAYA KABUPATEN TANGERANG

**TELAH HILANG SURAT TANAH :** AKTA JUAL BELI (AJB) NO. 2519 / 2014. DIKELUARKAN KANTOR PPATS KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN. PERSIL NO. 6111 BLOK 013.3733.0 KOHIR 1791, AN. ELIENA LIMOWA SELUAS 28 M<sup>2</sup>. LOKASI PRIYANG RT 005 RW 002 KELURAHAN PONDOK JAGUNG.KECAMATAN SERPONG UTARA.KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN.

LOTOMOTIF

**AKAN DIJUAL UNIT SEPEDA MOTOR** DENGAN NOPOL : B 3659 WCW. OLEH PT KB FINANSIA MULTI FINANCE CABANG CILEDUG. UNTUK INFO HUBUNGI (021) -38893004

KEHILANGAN

**TELAH HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 05124 NO. NIB 28.05.02.01.09050. LUAS TANAH 45 M2 BERLOKASI DI KEL. SUDIMARA BARAT KEC. CILEDUG KOTA TANGERANG AN. MUHAMAD YUSUP KOSIM. INFO 081388257220/RINI, 088210916808 ROSMINA**

KEHILANGAN

**TELAH HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 05126 NO. NIB 28.05.02.01.09052. LUAS TANAH 50 M2 BERLOKASI DI KEL. SUDIMARA BARAT KEC. CILEDUG KOTA TANGERANG AN. MUHAMAD YUSUP KOSIM. INFO 081388257220/RINI, 088210916808 ROSMINA**



# Makam Keramat Diduga Palsu Dibongkar

Dinilai Tidak Jelas Asal - Usulnya

**SATELITNEWS, PANDEGLANG** – Karena dinilai tidak jelas asal-usulnya, dan khawatir menyesatkan serta meresahkan masyarakat. Sebuah makam keramat diduga palsu, di Kampung Jaura, Desa Panjangjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, dibongkar warga.

Warga menyebut, keberadaan makam itu sempat menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Selain dianggap berpotensi memunculkan pemahaman yang keliru, makam tersebut juga dikhawatirkan dapat merusak akidah masyarakat.

Pembongkaran dilakukan, sebagai langkah untuk menghindari polemik berkepanjangan di tengah warga. Warga berharap, lokasi tersebut tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman maupun praktik-praktik yang dinilai menyimpang.

Informasi yang dihimpun, sejumlah warga bersama aparat pemerintah setempat membongkar makam keramat yang diduga palsu itu, menggunakan alat yang telah disiapkan.

Ketua MUI Desa Panjangjaya yang juga tokoh masyarakat se-

tempat, Suhendi mengatakan, keberadaan makam tersebut pertama kali diketahui setelah adanya laporan dari warga. Ia kemudian turun langsung ke lokasi, untuk memastikan informasi itu.

“Awalnya ada warga yang datang ke rumah, dan menyampaikannya kalau di lokasi itu ada makam baru. Setelah saya cek ke lapangan, ternyata memang benar ada bangunan makam baru,” kata Suhendi kepada awak media, Senin (30/3).

Menurut Suhendi, persoalan utama bukan pada bentuk bangunannya, melainkan karena tidak ada keterangan silsilah atau riwayat yang jelas terkait makam tersebut. Hal itu, yang kemudian memunculkan kecurigaan dan keresahan di tengah warga.

“Kalau bangunan sih bukan masalah. Tapi yang kami cari itu, kejelasan silsilahnya. Ini tidak ada penjelasannya, makanya kami curiga,” tandasnya.

Ia juga mengaku, khawatir keberadaan makam itu justru menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda. Terlebih, lokasi tersebut dikhawatirkan dapat dikaitkan dengan hal-hal yang berpotensi menyimpang dari ajaran agama.

“Yang kami takutkan, itu soal



**PEMBONGKARAN MAKAM:** Warga bersama aparat, membongkar makam keramat yang diduga palsu, di Kampung Jaura, Desa Panjangjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Senin (30/3).

akidah. Kalau dibiarkan, nanti anak cucu kita bisa salah paham,” ucapnya.

Suhendi mengatakan, sebelum pembongkaran dilakukan, dirinya sempat meminta petunjuk kepada tokoh agama setempat atau Abuya. Dari hasil konsultasi itu, makam tersebut kemudian disarankan untuk dibongkar.

Pembongkaran akhirnya dilakukan secara swadaya oleh warga, bersama pemerintah desa setempat dan Satpol PP Kabupaten Pandeglang.

“Iya, hari ini kami bersama unsur pemerintah desa, keca-

matan dan Satpol-PP juga hadir ikut membongkar,” ujarnya.

Warga berharap, langkah tersebut dapat mencegah munculnya kesalahpahaman di masyarakat, serta menjaga ketertiban lingkungan.

Sementara, Kepala Desa Panjangjaya, Saripudin Hasan, mengatakan keberadaan makam baru tersebut pertama kali dipersoalkan oleh masyarakat. Setelah menerima laporan, pihak desa bersama tokoh agama dan MUI Desa Panjangjaya kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. “Awalnya masyarakat memper-

tanyakan, adanya kuburan baru di lokasi itu. Setelah dicek, memang benar ada. Tapi setelah ditelusuri, asal-usul dan silsilahnya tidak jelas,” kata Saripudin.

Menurut dia, pemerintah desa sudah berkoordinasi dengan para ulama di Desa Panjangjaya hingga wilayah Kecamatan Mandalawangi untuk meminta pandangan terkait keberadaan makam tersebut. Hasilnya, makam itu dinilai tidak memiliki kejelasan riwayat maupun dasar yang kuat.

“Intinya dari hasil komunikasi dengan para ulama, makam itu dinilai tidak jelas keberadaannya. Karena itu, kami bersama masyarakat memutuskan untuk membongkarnya hari ini,” ujarnya.

Saripudin mengaku, terkejut saat mengetahui adanya makam baru tersebut. Sebab, kata dia, tidak pernah ada laporan maupun pemberitahuan kepada pemerintah desa terkait pembangunan makam itu.

“Saya pribadi kaget, karena tidak ada konfirmasi sama sekali. Minimal ke RT atau lingkungan setempat juga tidak ada pemberitahuan,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah desa sebelumnya juga telah mengimbau masyarakat agar setiap aktivitas yang berkaitan dengan lokasi pemakaman atau

tempat yang dianggap sakral harus dilaporkan terlebih dahulu kepada aparat lingkungan maupun tokoh masyarakat.

“Kami sudah mengimbau, kalau ada hal-hal seperti itu harus dilaporkan dulu, minimal ke RT, tokoh masyarakat, atau ulama setempat,” pungkasnya.

Selain soal silsilah yang tidak jelas, Saripudin menyebut, lokasi makam itu juga berada di area yang disebut masuk wilayah Perhutani. Menurutny, hingga kini tidak ada izin resmi terkait pembangunan makam tersebut.

“Setahu kami ini masuk kawasan Perhutani, dan sampai sekarang tidak ada izin. Kami juga sudah koordinasi, memang tidak ada izin,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah desa sebenarnya tidak akan mempermasalahkan keberadaan makam tersebut apabila memiliki riwayat yang jelas. Namun, karena asal-usulnya tidak diketahui, makam itu dikhawatirkan menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat.

“Kalau memang jelas keberadaannya, tentu kami dukung. Tapi ini kan tidak jelas. Yang kami khawatirkan, justru mengarah ke hal-hal negatif dan bisa merusak akidah masyarakat,” pungkasnya. **(mardiana)**



**SERAHKAN LKPD:** Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, serahkan LKPD Unaudited Tahun 2025 Ke BPK Perwakilan Provinsi Banten.

## Bupati Dewi Berharap Kembali Raih WTP

Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2025 Ke BPK Perwakilan Provinsi Banten

**SATELITNEWS, PANDEGLANG** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025, kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.

LKPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang Unaudited Tahun 2025, diserahkan langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Senin (30/3).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi mengungkapkan, laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang - undang nomor 1 tahun 2004 tentang, perbendaharaan negara antara lain menyatakan bahwa LKPD disampaikan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun bentuk kriteria penilaiannya, lanjut Firman, diantaranya kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan Perundang - undangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kecukupan pengungkapan sesuai SAP.

Ia juga menuturkan, dalam pemeriksaan laporan keuangan di wilayah Provinsi Banten ini, hanya memiliki waktu selama 2 bulan, setelah itu baru akan diumumkan hasil pemeriksaan ini pada akhir bulan mei 2026.

“Mohon dukungan dan kerjasama, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara, Bupati Pandeglang Dewi Setiani mengatakan, penyerahan laporan Keuangan Pemkab Pandeglang ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Ia juga menegaskan, Pemkab Pandeglang berkomitmen dalam pengelolaan keuangan ini dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, sehingga hasil dari laporan keuangan ini Kabupaten Pandeglang bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Semua diupayakan disusun berdasarkan standar yang ada, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya. **(mardiana)**



## HALAL BIHALAL

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kinerja, guna terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya, saat menghadiri Halal Bihalal bersama para ASN, di halaman Kantor Sekretariat Daerah Pandeglang, Senin (30/3/).

# Berkutat Pada Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pemkab Pandeglang Gelar Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2027

**SATELITNEWS, PANDEGLANG** - Harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang hingga kini, masih berkuat pada kebutuhan dasar seperti Infrastruktur jalan, pendidikan dan layanan kesehatan.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang TB. A. Khatibul Umam, saat menjadi salah satu pemateri di acara Musrenbang RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2027, di Aula Pendopo Bupati, Senin (30/3).

Katanya, pemenuhan kebutuhan tersebut bukan terbatas pada sarana prasarana nya saja, namun juga harus ditopang dengan kualitas pendididk nya, serta kebutuhan pendidikan lainnya.

Selanjutnya, kata Umam, layanan kesehatan diharapkan lebih baik, mudah, cepat dan sarana prasarana nya menunjang. Seringkali dilema, antara pelayanan dengan pemasukan yang harus dicapai.

“Termasuk, lapangan kerja, yang terbilang masih minim. Jika tidak menciptakan lapangan kerja, paling tidak mendatangkan investor untuk berinvestasi dan menyerap lapangan kerja,” kata Umam, Senin (30/3).

Menurutnya, pengembangan



**MUSRENBANG:** Tiga Narasumber menyampaikan materinya masing - masing, dipandu moderator yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Sutoto, di acara Musrenbang Kabupaten Pandeglang TA 2026, di Aula Pendopo Bupati, Senin (30/3).

pariwisata juga, harus menjadi perhatian serius Pemda. Jangan sampai membludaknya pengunjung ke kawasan wisata di Pandeglang, tapi tidak ada dampak peningkatan PAD atau perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pariwisata.

Semua perencanaan yang sudah disepakati, ujarnya, selayaknya di-realisasikan dengan matang. Sesuai Visi-misi dan lain-lainnya.

Sementara, pemateri lainnya yaitu Kepala Bappeda Provinsi Banten Babar Suharso menyatakan, perencanaan program itu bertahap, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, OPD dan Kabupaten, lalu di musyawarah di tingkat Provinsi.

Semua program berbasis keuangan atau anggaran ujarnya, harus dipertanggungjawabkan. Bahkan, ada forum Renja semua OPD Se-Provinsi Banten yang diharapkan dihadiri langsung oleh Kepala OPD nya.

“Semua usulan program berjenjang itu, harus disusun sesuai tingkatannya. Penyusunan RKPD Tahun 2027, berdasarkan RPJMD 2025 - 2029 Provinsi Banten,” pungkasnya.

Indikator yang harus diperhatikan diantaranya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dimana LPE Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari Provinsi.

Peningkatan investasi, juga ha-

rus dilakukan bersama-sama antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Provinsi Banten sangat mendorong tumbuhnya industri/investasi padat karya berbasis lokal di wilayah selatan, khususnya dekat exit tol Bojong dan sekitarnya.

Faktor pendukung lainnya, seperti pendidikan dan perekonomian masyarakat, harus dipersiapkan. Termasuk, sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan perkebunan.

“Versi BPS, angka kemiskinan di Pandeglang, 8,51 persen. 5,63 tingkat Provinsi Banten. Alokasi anggaran Provinsi Banten Tahun 2026, sebesar Rp 552,827,515,925,” tuturnya.

Anggaran sebesar itu, dibagi beberapa urusan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, serta yang lainnya.

Kemudian, Plt. Asda III Setda Pandeglang, TB. Nandar Suptandar, berharap ada multi efek termasuk penyerapan lapangan kerja, ketika tol Serang - Panimbang (SerPan) selesai dibangun sampai ke Panimbang, Bojong dan sekitarnya.

“Prioritas program tahun 2027 yaitu, peningkatan akses infrastruktur jalan, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Semua itu, harus kita kawal dan wujudkan bersama,” imbuhnya. **(mardiana)**



